BUKU MONOGRAF

# EKONOMI BISNIS

## STRATEGI PESANTREN MENUJU EKONOMI KREATIF

M. Yakub, SH.I., M.E.
Habibul Umam Taqiuddin, S.H.,M.H.

Habibul Umam Taqiuddin, S.H., M.H
M. Yakub, S.H.I., M.E.

# Ekonomi Bisnis: Strategi Pesantren Menuju Ekonomi Kreatif

**Ekonomi Bisnis: Strategi Pesantren Menuju Ekonomi Kreatif**

**Penulis**
Habibul Umam Taqiuddin, S.H., M.H
M. Yakub, S.H.I., M.E.

**Editor**
Dr. Lalu Moh Yudha Isnaini, M.Pd
Muhammad Syamsussabri, M.Pd

**Desain Sampul**
Muhammad Zul Amri Izzudin, M.Sc

**Ukuran**
vi + 108 hlm, Uk: 16 x 24 cm

**ISBN**
978-623-99071-4-3

**Penerbit**
**UNU NTB Press**
Jl. Pendidikan No.06, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB 83125
Website: http://lppm.unu-ntb.ac.id/
E-Mail: ununtb.press@gmail.com
Instagram/FB: @lppmununtb_official
WA: +62 85-2050-339-79

Cetakan Pertama, Januari 2023

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah wasyukrulillah*, segala puji bagi *Allah Azawajalla*. Atas nikmat, taufik dan hidayahnya, Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam, semoga kita mendapatkan *syafaatnya diyaumilkiyamah Amin Allahhumm Aamiin*, penulis dapat menyelesaikan buku sesuai target. Dari huruf ke huruf dan rangkaian kata-kata bisa menjadi sekumpulan tulisan sederhana sehingga menjadi buku lalu terbit sehingga bisa kami persembahkan untuk yang muliya sahabat pembaca, terutama bagi mahasiswa dan keluarga besar Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB Kampus Peradaban Bangsa buku ini berjudul **"Ekonomi Pembangunan (Strategi Pesantren Menuju Ekonomi Kreatif)''** kalau bicara mengenai ekonomi sangat luas pembahasannya, karena menjalankan kehidupan di dunia yang fana ini harus dibekali dengan ilmu ekonomi Islam dan konvensional, apalagi menjalankan ekonomi rumah tangga, ekonomi pesantren, ekonomi masyarakat, bahkan membangun ekonomi negara.

Persoalan ekonomi bisa membuat orang siap mengambil resiko baik dalam keadaan apapun, karena sudah merasa terdesak dan pemikiran sudah mulai rumit, sehingga banyak masyarakat terjerumus untuk berhutang, ada juga yang menjual asset pribadi dan menjual harta warisannya, bahkan ada yang sampai meninggalkan keluarga kecilnya untuk mencarikan nafkah demi kebutuhan untuk memenuhi papan, pangan dan sandang solusi menurut mereka adalah ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) "*merantau*''.

Buku ini pada awalnya adalah hasil penelitian penulis, materi perkuliahan yang penulis sampaikan di beberapa seminar ilmiah dan

berbagai forum diskusi, kemudian disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan gaya hidup masyarakat yang penuh dengan lika-liku tantangan zaman dan pengaruh ekonomi global, semoga dengan hadirnya buku ini sahabat pembaca mempunyai refrensi untuk menjalankan roda muamalah.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih pada para pihak yang telah membantu proses penyusunan buku ini. Kepada kedua orang tua penulis (Alm. Amak Ismail dan Inaq Jumani) yang telah melahirkan dan mengasuh dan menyusui, sehingga mendidik penulis sampai bisa menjadi seperti ini. Kepada istri tercinta Nuli Purwanti, S.Sy dan (Alm. Anak kami Muhammad Ramadhan Putra Yakub). Para sahabat dosen dan civitas akademik yang juga memotivasi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Semoga pengorbanan yang telah diberikan di catat sebagai amal ibadah.

Sesuai dengan pribahasa pepatah lama “Tak ada gading yang tak retak”, maka kesempurnaan buku ini, penulis menghargai dan mengapresiasi setiap masukan dan saran dari para pembaca yang Budiman. Kepada Allah *jua’alah* penulis mengharap ridhanya.

*Wallahulmuwafiquilaaqwamitthoriq Wr. Wr.*

**Mataram, Januari 2023**
**Tim Penyusun**

# DAFTAR ISI

# Bab 1 Strategi

## A. PENGERTIAN STRATEGI SECARA UMUM DAN KHUSUS

Istilah Strategi mula-mula dipakai di kalangan militer dan diartikan sebagai seni dalam merancang (operasi) peperangan, terutama yang erat kaitannya dengan gerakan pasukan dan navigasi ke dalam polisi perang yang dipandang paling menguntungkan untuk memperoleh kemenangan. Penetapan strategi tersebut harus didahului oleh analisis kekuatan musuh yang meliputi jumlah personal, kekuatan senjata, kondisi lapangan, posisi musuh, dan sebagainya. Dalam perwujudannya, strategi tersebut akan dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut menjadi tindakan- tindakan nyata dalam medan pertempuran. (Abu Ahmadi, dan Joko Tri Prasetya, 1997: 11.

Istilah strategi dewasa ini banyak dipakai oleh bidang-bidang ilmu lainnya, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kemudian jika dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar, maka strategi dalam artian khusus bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan yang dilakukan guru-murid dalam suatu perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan (Abu Ahmadi, dan Joko Tri Prasetya, 1997: 12).

Dalam pemilihan strategi haruslah dipilih strategi yang tepat, pengajaran yang diberikan kepada anak didik tidak bersifat paksaan bahkan perilaku pemimpin kadang tidak perlu dilakukan. Sebagai gantinya, para pendidik harus bersikap ngemong atau among. Para

guru seharusnya tidak mengajarkan pengetahuan mengenai dunia secara dogmatik. Sebaliknya mereka hanya berada dibelakang anak didik sambil memberi dorongan untuk manju, secara khusus mengarahkan ke jalan yang benar, dan mengawasi kalau-kalau anak didik menghadapi bahaya atau rintangan. Anak didik harus memiliki kebebasan untuk maju menurut karakter masing-masing dan untuk mengasah hati nuraninya. Dengan demikian tugas pendidik adalah memikirkan dan memilih strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik anak didiknya.

Tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan akan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna, maka guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengatur secara umum komponen-komponen pembelajaran sedemikian rupa sehingga terjalin keterkaitan fungsi antara komponen pembelajaran yang dimaksud.

## B. PENGERTIAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN (*LEARNING OBJECTIVES*)

Kata pembelajaran sengaja dipakai sebagai padanan kata yang berasal dari bahasa Inggris *Instruction.* Kata *Instruction* mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengajaran. Jika kata pengajaran ada dalam konteks guru-murid di kelas (ruang) formal, pembelajaran atau Instruction mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang tak dihadiri guru secara fisik. Oleh karena dalam Instruction yang ditekankan adalahproses belajar, maka usaha-usaha yang terencana dalam manipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa kita sebut pembelajaran (Arief S. Sadirman, 1996: 7).

*Learning Objectives* (LO) adalah istilah yang menggabungkan *(*compounding*)* dua kata, yaitu kata *Learning* yang berarti “belajar”

atau pembelajaran dan kata *Objectives* yang berarti "tujuan". Secara harfiah LO itu berarti tujuan belajar, sedangkan menurut istilah adalah sebagai berikut:

Cranton mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan-pernyataan tentang pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan dari peserta setelah selesai pembelajaran (Cranton, 1989). Sementara itu, Meger dalam bukunya yang berjudul *Preparing Instructional Objetives* (1975), menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah gambaran kemampuan mahasiswa yang menunjukkan kinerja yang diinginkan yang sebelumnya mereka tidak mampu.

Di samping tersebut di atas, ada juga yang mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah *Learning Objectives are statement articulating the learning your will achieve* in *your cours* (Lihat Hand Out Workshop Sistem Pendidikan, 1996). Artinya bahwa tujuan pembelajaran ialah pernyataan-pernyataan yang menyatakan hasil belajar yang akan dicapai oleh mahasiswa pada mata kuliah anda (Hisyam Zaini, 2002: 57).

Ada beberapa istilah semakna dengan *Learning Objectives* (LO), di antaranya adalah Learning *Outcomes* dan Tujuan Intruksional. Istilah yang populer digunakan di Indonesia adalah tujuan instruksional. Adapun tujuan intruksional dibagi menjadi dua, yaitu: (1) tujuan instruksional umum (TIU), yaitu pernyataan yang menggambarkan kemampuan umum yang seharusnya dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan satu bidang studi atau mata kuliah selama satu semester. (2) tujuan instruksional khusus (TIK), yaitu tujuan yang menggambarkan hasil belajar yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah tatap muka dengan satu pokok bahasan atau topik pelajaran tertentu (Hisyam Zaini, 2002: 58).

Namun pembahasan kali ini, penekanan istilah yang digunakan

adalah *Learning Objectives* (LO), yaitu pernyataan-pernyataan yang menggambarkan hasil belajar yang akan dicapai oleh mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran satu semester. Meskipun LO dibuat untuk satu semester, tetapi tidak berarti pernyataan-pernyataan itu dibuat bersifat general (tidak operasioanal), sebagaimana yang terdapat dalam TIU atau TPU. LO harus tetap spesifik (operasional), akan tetapi,sifat spisifik itu tidaklah berarti seperti apa yang ada dalam TIK atau TPK yang hanya menggambarkan tujuan untuk satu kali tatap muka. Satu hal yang juga harus diperhatikan bahwa LO itu seyogianya bersifat *content-free,* maksudnya dalam menyusun LO jangan hanya mengambil dari topik materi yang ada dalam silabus yang mencakup pokok bahasa satu kali tatap muka. Contoh LO (Tujuan Pembelajaran) yang berorientasi kepada konten adalah sebagai berikut:

a. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari hati.
b. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari paru-paru.
c. Mahasiswa mampu menggambarkan fungsi-fungsi hati.
d. Mahasiswa mampu menggambarkan fungsi paru-paru.

Keempat LO di atas dapat diformulasikan menjadi dua hal LO yang lebih general, yaitu sebagai berikut:

a. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari sebuah struktur yang diberikan.
b. Mahasiswa mampu menggambarkan fungsi-fungsi dari struktur yang diberikan.
c. Dari dua pernyataan tersebut menggambarkan dengan jelas tetang tipe kinerja yang harus didemonstrasikan oleh mahasiswa. Namun, ia tidak terkait secara langsung dengan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti pada empat contoh sebelumnya. Keuntungan dari pernyataan bebas materi

*(content-free)* yaitu dapat digunakan untuk beberapa unit pembelajaran. (Hisyam Zaini, 2002: 59)

## C. PENGERTIAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Dalam proses belajar-mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa dapat belajar secara efektif dan efesien. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut metode mengajar.

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bersifat edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antar guru dan anak didik. Interaksi yang bersifat edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaraan dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pengajaran.

Dalam kamus ilmiah populer strategi mempunyai arti ilmu siasat atau muslihat untuk mencapai suatu tujuan. (Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001: 727) Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan. (Syaiful Bahri Jamrah dan Aswan Zain, 1996: 5) Dihubungkan dengan proses pembelajaran, strategi biasa diartikan sebagai siasat atau pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiaatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mc. Leod mengatakan bahwa secara harfiah dalam bahasa *Inggris* kata “strategi” dapat diartikan sebagai seni (*art)* melakasanakan *strategem* yakni siasat atau rencana. (Muhibbin Syah, 2003: 214) Istilah

startegi sering digunakan dalam banyak konteks dengan makna yang tidak sama. Dalam kontek pembelajaran, Nana Sudjana juga mengatakan bahwa strategi mengajar adalah " taktik" yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar (pembelajaran) agar dapat mempengaruhi siswa (peserta didik) untuk mencapai tujuan pembelajaran (TIK) secara efektif dan efesien (Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, 133).

Hilda Taba menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan dan fasilitas bagi siswa menuju tercapainya tujuan pembelajaran (Supriadi Saputro, 2000: 21).

Sedangkan menurut Slameto strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sasaran yang ada untuk mreningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam konteks ini adalah pembelajaran (Slameto, 1991: 90).

Strategi Pembelajaran merupakan garis besar haluan bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam arti ilmu dan kiat didalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan/atau yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi Pembelajaran adalah metode dalam arti luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial yaitu memilih dan menentukan perubahan perilaku, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan

## D. UNSUR-UNSUR STRATEGI PEMBELAJARAN

Agar dapat merancang serta melaksanakan strategi pembelajaran yang efektif perlu memperhatikan unsur-unsur strategi dasar atau tahapan langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan spesifikasi dari kualifikasi perubahan perilaku, tujuan selalu dijadikan acuan dasar dalam merancang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara spesifik dalam arti mengarah kepada perubahan perilaku tertentu dan operasional dalam arti dapat diukur.
2. Memilih pendekatan pembelajar, suatu cara pandang dalam menyampaikan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran harus dipertimbangkan dan dipilih jalan pendekatan utama yang dipandang paling ampuh, paling tepat, dan paling efektif guna mencapai tujuan.
3. Memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. (1) Metode merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan bahan sesuai dengan tujuan pembelajaran (2) Teknik merupakan cara untuk melaksanakan metode dengan sarana penunjang pembelajaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan belajar untuk mencapai tujuan (3) Merancang Penilaian (4) Merancang Remedial (5) Merancang Pengayaan.

## E. MACAM-MACAM STRATEGI

Secara umum strategi pembelajaran dibagi menjadi tiga:

1). Strategi Induktif adalah suatu strategi pembelajaran yang memulai dari hal-hal yang khusus barulah menuju hal yang umum.

2). Strategi Deduktif adalah suatu strategi pembelajaran yang umum menuju hal-hal yang khusus.

3). Strategi campuran adalah gabungan dari strategi induktif dan deduktif. Adapula strategi regresif yaitu strategi pembelajaran yang memakai titik tolak jaman sekarang untuk kemudian menelusuri balik (kebelakang) ke masa lampau yang merupakan latar belakang dari perkembangan kontemporer tersebut.

Menurut Gagne mengemukakan ada lima pendekatan yang diistilahkan dengan proses atau jalur belajar yaitu: 1. informasi verbal, 2. kemahiran intelektual, 3. pengaturan kegiatan kognitif, 4. keterampilan motorik dan 5. sikap. Sedang merumuskan tujuan pembelajaran Gagne tetap berpedoman dengan taksonomi Bloom dan kawan-kawan dengan 3 ranah perwujudan pembelajaran menurut Gagne pada Tabel 1.1

| Ranah Kognitif | | Ranah Afektif | | Ranah Psikomotorik | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloom | Gagne | Bloom | Gagne | Bloom | Gagne |
| Pengetahuan | Informasi Verbal | Penerimaan<br>Partisipasi<br>Penilaian dan Penemuan Sikap<br>Organisasi<br>Pembentukan Pola hidup | Sikap | Persepsi<br>Persiapan<br>Gerakan Terbimbing<br>Gerakan Yang Terbiasa<br>Gerakan yang Kompleks<br>Penyesuaian<br>Kreativitas | Keterampilan Motorik |

## F. RUANG LINGKUP STRATEGI PEMBELAJARAN

Strategi pembelajaran aktualisasinya berwujud serangkaian dari keseluruhan tindakan strategis guru dalam rangka mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Efektifitas Strategi dapat diukur dari tingginya kuantitas dan kualitas hasil belajar yang dicapai anak. Sedangkan efisien dalam arti penggunaan Strategi yang dimaksud.

Sesuai dengan waktu, fasilitas, maupun kemampuan yang tersedia. Secara singkat, menurut Slameto strategi pembelajaran mencakup 8 unsur perencanaan tentang:

1. Komponen sistem yaitu guru/dosen, siswa/mahasiswa baik dalam ikatan kelas, kelompok maupun perorangan yang akan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar telah disiapkan,
2. Jadwal pelaksanaan, format dan lama kegiatan telah disiapkan,
3. Tugas-tugas belajar yang akan dipelajari dan yang telah diidentifikasikan,
4. Materi/bahan belajar, alat pelajaran dan alat bantu mengajar yang disiapkan dan diatur,
5. Masukan dan karakteristik siswa yang telah diidentifikasikan,
6. Bahan pengait yang telah direncanakan,
7. Metode dan teknik penyajian telah dipilih, misalnya ceramah, diskusi dan lain sebagainya, dan
8. Media yang akan digunakan (Slameto, 1991: 91-92)

Keseluruhan tindakan strategis guru dalam upaya merealisasikan kegiatan pembelajaran, mencakup dimensi yang bersifat makro (umum) maupun bersifat mikro (khusus). Secara makro, strategi pembelajaran berkait dengan tindakan strategis

guru dalam:

(a) memilih dan mengoperasionalkan tujuan pembelajaran

(b) memilih dan menetapkan setting pembelajaran

(c) pengelolaan bahan ajar

(d) pengalokasian waktu

(e) pengaturan bentuk aktivitas pembelajaran

(f) metode teknik dan prosedur pembelajaran

(g) pemanfaatan penggunaan media pembelajaran

(h) penerapan prinsip-prinsip pembelajaran

(i) penerapan pendekatan pola aktivitas pembelajaran

(j) pengembangan iklim pembelajaran

(k) pemilihan pengembangan dan pelaksanaan evaluasi (Supriadi Saputro, 2000: 23-24).

Bertolak dari jabaran tentang tindakan strategis guru tersebut di atas, kiranya dapat dimengerti bahwa secara makro, strategi pembelajaran berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan program pembelajaran. Oleh karena itu, strategi pembelajaran mengaktual pada strategi perencanaan, pelaksanaan dan strategi penilaian pembelajaran.

## G. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Semarang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat 1, pasal 20, pasal 21, pasal 22D ayat 1, dan pasal 33

ayat 4.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif.

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
10. Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, yaitu "Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur".
11. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs).
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024.
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

## H. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan Pondok Pesantren Al-istiqomah kapu, bertempat di Dusun Kapu Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Penentuan lokasi penelitian ini menggunakan metode purposive area yaitu lokasi penelitian yang ditentukan secara sengaja. Adapun pertimbangan peneliti memilih Pondok Pesantren Al-istiqomah kapu karena Pondok Pesantren Al-Istiqomah kapu merupakan salah satu

pondok pesantren yang mentransfer nilai-nilai ekonomi kreatif kepada santrinya dengan cara melibatkan santri dalam kegiatan program kewirausahaan. Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola Pondok Pesantren Al-Istiqomah kapu TGH. Hidayatullah Jazri, LC, sekaligus pimpinan pondok, juga ada pengelola seperti ustad dedi kepala sekolah Madrasah Aliyah, Ustad Wildan, Ustad Kiki Wahyudi dan Ustadzah Ria, yang juga berlaku sebagai informan utama, sedangkan informan tambahan yaitu santri yang ikut dalam program kewirausahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## I. HASIL PENELITIAN

### 1. Strategi Dalam Penanaman Nilai-Nilai Ekonomi Kreatif Santri

Pondok pesantren mulai melakukan berbagai strategi untuk menjadikan para santrinya memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang apapun. Hal ini merupakan inovasi baru yang diberikan oleh pondok pesantren untuk membentuk santri yang memiliki jiwa wirausahawan.

Pelaksanaan strategi yang tepat, akan mudah untuk mentransfer nilai-nilai kewirausahaan kepada santri. Adapun strategi transformasi sendiri merupakan cara, kiat dan taktik yang dirancang untuk mentransfer suatu nilai kewirausahaan agar tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa strategi di pondok pesantren Al-istiqomah kapu dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 2. Business Center

Business center merupakan kegiatan usaha di sekolah, dimana siswa secara langsung melakukan kegiatan perdagangan atau retail.

Business center sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada santri, pondok pesantren Al-istiqomah kapu dalam mentransfer nilai kewirausahaan yaitu dengan melibatkan santri dalam unit usaha yang ada di pesantren diantaranya koperasi pondok dan kantin pesantren. Kegiatan business center ini masing-masing santri bertanggung jawa atas tugasnya, bagian tugas dari masing-masing santri yaitu bagian kasir untuk setiap harinya mencatat hasil keseluruhan pendapatan dan dilaporkan kepada pengasuh untuk setiap minggunya. Petugas bagian pramuniaga memiliki tugas untuk display barang dagangan. Untuk petugas bagian pembelian atau gudang yaitu mulai dari memasukkan transaksi setiap pembelian barang sekaligus tanggal jatuh tempo, mengecek barang datang sesuai dengan nota pembelian dan menyesuaikan harga jual dengan harga beli jika ada kenaikan atau penurunan harga.

### 3. Strategi Penanaman Nilai-Nilai Ekonomi Kreatif yang di Transformasikan pada Santri

Selain memberikan bekal ketrampilan, program kewirausahaan Pesantren Al-istiqomah kapu juga digunakan sebagai sarana dalam menanamkan nilai-nilai jiwa wirausahawan kepada santri. Pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan sebagai upaya menanamkan nilai-nilai wirausaha, hal ini juga disampaikan oleh TGH. Hidayatulla Jzri, LC sebagai berikut:

*“Selain kami memberikan ilmu AL-Quran dan Hadits, ada juga program unggulan kami di pondok yakni Bahasa inggris dan Bahasa arab, kami mengajarkan ketrampilan, langsung paktik bercocok tanam berkebun di sekitar pondok, program seni dan pramuka, kewirausahaan ini juga untuk menanamkan karakter seorang wirausaha. Jadi santri tidak hanya tahu dan mempraktikkan bisnis saja, tetapi santri juga lebih berani, disiplin, kreatif, dapat bertanggung*

*jawab, serta dapat menjadi pemimpin bagi diri sendiri, juga sahabat santri yang lain" (pimpinan pondok).*

Pengasuh pondok Al-istiqomah kapu mempunyai harapan bahwa setelah santri mendapatkan bekal kewirausahaan, maka santri mempunyai ketrampilan yang disesuaikan dengan bakatnya dan sikap santri berubah menjadi lebih disiplin, berani bertanggung jawab, dapat menjadi pemimpin dan dapat bekerja sama dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa nilai-nilai kewirausahaan di pondok pesantren al-istiqomah kapu dapat dijelaskan sebagai berikut:

**4. Menumbuhkan Jiwa Kepemimpinan pada Santri melalui Program Wirausahawan**

Salah satu cara mentor mengajarkan tanggung jawab adalah dengan melibatkan santri mengelola unit usaha yang ada di pesantren yaitu mengolah minuman sari buah dari buah-buahan. Dengan mentor memberikan modal kepada santri, santri diminta untuk menjalankan bisnisnya yaitu membuat minuman sari buah yang kemudian produk minuman sari buah tersebut dipasarkan. Setelah pemasaran santri membuat laporan keuangannya. Harapannya modal yang diberikan kepada santri dapat dikembalikan setelah santri selesai berjualan. Apabila santri tidak menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggung jawab, maka yang terjadi adalah kerugian yang didapat bukanlah keberuntungan.

**5. Menanamkan Mental Disiplin pada Santri melalui Program Wirausahawan**

Menanamkan mental disiplin kepada santri dilakukan dengan cara memberikan tugas proyek kepada santri dalam satu tim, dimana sudah ditentukan time achedulenya oleh mentor, apabila dalam satu

tim ada yang tidak disiplin, maka proyek tersebut hasilnya tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan. Misalnya dalam bidang bisnis penjualan perkebunan seperti buah anggur, manga duren dan pisang, apabila di bagian tim pemasaran tidak disiplin waktu, maka yang terjadi di bagian penjualan akan terkendala. Waktu pun terbuang sia-sia dan target penjualan pun akan mundur.

**6. Menumbuhkan Jiwa Kreatif, Inovatif, dan Berani Mengambil Resiko**

Pembentukan jiwa kreatif pada santri dilakukan dengan memberikan modal kepada santri, lalu santri membuat perencanaan, melakukan kegiatan produksi, sampai dengan merancang strategi dalam memasarkan produk-produknya. Proses pembelajaran kreatif dan inovatif dilakukan dengan cara mentor memberikan keluasan kepada para santri untuk memproduksi batik dengan desain dan warna yang mereka inginkan, dengan cara seperti itu santri akan bangga dan puas dengan hasil atau karya mereka sendiri. tidak hanya produksi batik, para mentor juga membebaskan santri di setiap kelompok untuk memilih dan menentukan jenis buah yang akan dikelola untuk dijadikan sari buah dan dijual.

Jenis bahan-bahan yang akan dikelola sebelumnya dirapatkan dulu di dalam kelompok, sehingga terdapat kesepakatan dalam kelompok. Dalam menentukan jenis barang yang akan dijual santri akan dihadapkan pada dua pilihan yang pertama, mereka akan mengikuti tren atau santri akan membuat produk yang sebelumnya belum ada di pasaran. Tentunya akan ada konsekuensi masing-masing dari setiap pilihan yang mereka sepakati. Apabila mengikuti tren, maka barang yang mereka jual akan habis. Sebaliknya, apabila mereka membuat inovasi baru belum tentu dapat habis dengan cepat.

## J. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari di susunnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perkembangan dan karakteristik ekonomi kreatif di pondok pesantren Lombok Utara.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan inklusif dan berkelanjutan ekonomi kreatif di pesantren Lombok Utara.
3. Mendesain dan Menyusun model strategi pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan di pesantren Lombok Utara.

## K. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai evaluasi pencapaian pondok pesantren Lombok utara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inovatif dan yang berkelanjutan. Dari penelitian ini, dapat diidentifikasikan perkembangan ekonomi kreatif dan mendesain peran dari stakeholder dalam mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif.

# Bab 2 Tinjauan Pustaka

## A. LANDASAN TEORI

1. Ekonomi Kreatif Menurut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF, 2017), ekonomi kreatif (ekraf) didefinisikan sebagai penciptaan nilai tambah dari kreativitas yang dilindungi kekayaan intelektual, dan bersumber dari pengelolaan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Dalam hal ini, unsur dari nilai tambah menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari unsur kreativitas. Ekonomi Kreatif secara khusus tidak hanya berfokus kepada penciptaan nilai tambah secara ekonomi, namun juga penciptaan nilai tambah secara sosial, budaya dan lingkungan. Ekonomi Kreatif (Ekraf) adalah paradigma ekonomi baru yang mengandalkan gagasan, ide, atau kreatifitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sumber daya utama dalam Ekraf adalah kreativitas, yakni kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, solusi dari suatu masalah, atau sesuatu yang berbeda dari pakem. Namun selain kreativitas, unsur lain yang dianggap penting untuk menunjang Ekraf adalah nilai tambah. Nilai tambah ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas produk dari segi nilai dan ekonomi. Kegiatan seperti hobi yang dilakukan secara cuma-cuma belum bisa digolongkan ke dalam Ekraf.
2. Ekonomi kreatif sebenarnya adalah wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas, yang mana pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu iklim

perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Dengan kata lain ekonomi kreatif adalah manifestasi dari semangat bertahan hidup yang sangat penting bagi negara-negara berkembang. Menurut Polnya (2015), pesan besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, talenta dan kreativitas. Pengertian ekonomi kreatif menurut para ahli yang dimaksudkan oleh Howkins yaitu ekonomi kreatif sebagai the creation of values as a result of idea. Howkins menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat yang mana menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide. Kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya dilakukan sesekali melainkan berulang dan rutin. Hal ini bisa disimpulkan bahwa Howkins menitikberatkan suatu ekonomi pada suatu ide yang dipikirkan secara matang yang bisa menghasilkan hasil yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 mengenai ekonomi kreatif. Didalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Perpres Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif telah mengklarifikasi ulang subsektor industri kreatif 16 subsektor. Definisi ke-17 subsektor industri kreatif tersebut mengacu pada publikasi “Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025, Rencana Aksi Jangka Menengah 2015- 2019, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi (Ekraf Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah diolah 2018). Adapun 16 subsektor tersebut yaitu:

1. Film, Animasi dan Video
2. Aplikasi dan Game
3. Musik
4. Arsitektur
5. Desain Komunikasi Visual
6. Fashion
7. Kriya
8. Kuliner
9. Desain Interior
10. Desain Produk
11. Fotografi
12. Periklanan
13. Penerbitan
14. Seni Pertunjukan
15. Seni Rupa
16. Televisi dan Radio

Sedangkan menurut OPUS Ekonomi Kreatif 2020, subsektor ekonomi kreatif berubah menjadi 17 subsektor. Adapun 17 subsektor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembang Permainan
2. Arsitektur
3. Desain Interior
4. Musik
5. Seni Rupa
6. Desain Produk
7. Fashion
8. Kuliner
9. Film, Animasi, dan Video
10. Fotografi

11. Desain Komunikasi Visual
12. Televisi dan Radio
13. Kriya
14. Periklanan
15. Seni Pertunjukan
16. Penerbitan
17. Aplikasi

Indikator keberlangsungan ekonomi kreatif pada industri kreatif menurut adalah sebagai berikut (Hartono, 2010):

1. Produksi Dalam teori konvensional, menurut Adiwarman disebutkan bahwa teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan (input) untuk produksi dan menjual keluaran atau produk. Lebih lanjut ia menyebutkan teori produksi juga memberikan penjelasan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Tri Pracoyo dan Antyo Pracoyo mendefinisikan bahwa produksi sebagai suatu proses mengubah kombinasi berbagai input menjadi output. Pengertian produksi tidak hanya terbatas sebagai proses pembuatan saja tetapi hingga pemasaranya.
2. Pasar dan Pemasaran Pasar adalah tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Para ekonom mendeskripsikan pasar sebagai sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atas kelas produk tertentu (Kotler, 2008). Menurut Djasalim S. bahwa pasar adalah pelanggan potensial dengan kebutuhan dan keinginan tertentu yang bersedia dan mampu mengambil bagian dalam jual beli untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan (Herdiana, 2015).

Selanjutnya dalam pengertian pemasaran Djasalim S. mengemukakan pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, medistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Selain itu, menurut Kotler dan Armstrong memberikan definisi pemasaran sebagai suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses yang menciptakan komunikasi penyampaian pada pelanggan dan untuk mengelola korelasian pelanggan untuk mencapai benefit bagi organisasi (stakeholder).

3. Manajemen dan Keuangan Mary Parker Follet mendefinisikan dari manajemen adalah sebagai suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Stoner mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu definisi yang lebih kompleks dari suatu seni, bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usahausaha para anggota organisasi dan penggunaan

Sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Rokhayati, 2014). Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan (Fahmi, 2014).

Kebijakan Pemerintah Pemerintah didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas untuk mengelola suatu negara. Sebagai sebuah kesatuan politik, atau aparat / alat negara yang

memiliki badan yang mampu memfungsikan dan menggunakan otoritas / kekuasaan. Dengan ini, pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

## B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KREATIF

Pemberdayaan masyarakat kreatif juga perlu untuk mendayakan skil yang dimiliki baik dalam kerajinan tangan seperti anyaman bambu, kerajinan kain tenun sehingga perlu di kembangkan perlu kita berikan solusi supaya mereka (masyarakat) berinovasi dalam hal baru supaya tidak tersingkirkan di pasar global, Pengembangan adalah penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab berbeda atau lebih yang tinggi di dalam organisasi. Bentuk dari penyiapan tersebut berupa pendidikan yang dimandatkan untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai praktisi yang profesional. Pengembangan ini tidak hanya berupa pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada individu saja, namun termasuk juga variasi kegiatan dalam pengembangan individu, pengembangan sistem dll. Oleh karena itu, pengembangan ini mencakup beberapa hal, maka program pengembangan perlu direncanakan dengan baik agar pengembangan yang dilakukan tidak hanya sebatas pengembangan untuk kebutuhan saat ini, namun juga untuk kebutuhan di masa yang akan dating (Suwatno & Priansa, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Dalam penelitian ini membahas mengenai *pemberdayaan masyarakat kreatif dalam penanggulangan kemiskinan pada pelaku usaha kain sesekan di Kecamatan jonggat,* mengingat bahwa pengembangan *usaha kain sesekan* merupakan kunci kemajuan. Karena dengan cara itulah dapat mengurangi jumlah pengangguran,

menciptakan lapangan kerja, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterpurukan ekonomi, dan tetap menjunjung etika.

Dalam hal ini, bagaimana menyangkut dikembangkannya budaya *usaha kain sesekan* terutama di kalangan perajin tenun yang tidak hanya menghasilkan perajin yang terampil, kreatif, dan inovatif, tetapi juga beretika dengan mengenalkan mereka terhadap norma dan nilai-nilai etika dalam *usaha kain sesekan* sehingga dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya *usaha kain sesekan* atau kewirausahaan dalam antropologi budaya yang berhubungan dengan entrologi mempelajari tingkah laku manusia baik individu maupun kelompok dan tidak hanya kegiatan yang bisa diamati dengan mata saja, tapi juga yang ada dalam pikiran mereka. Tingkah laku ini tergantung pada proses pembelajaran dengan mencontoh dari generasi di atasnya dan juga dari lingkungan alam dan social yang ada di sekelilingnya dan inilah yang disebut dengan kebudayaan atau budaya. Agar dapat dikatakan sebagai kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan seseorang individu harus dimiliki bersama oleh kelompok (Leonard Siregar, Antropologi dan Konsep Kebudayaan. *Jurnal Antropologi Papua*, (2012) Volume 1, No. 1, Agustus 2).

Sebagaimana yang dapat dilihat bahwa hamper setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausahawan, sehingga keragaman akan menjadi tanda kewirausahaan dan berbagai ragam orang yang membentuk struktur kewirausahaan tersebut. Keragaman kewirausahaan tersebut seperti bagian dalam sebuah bisnis.

Secara nasional sampai saat ini, berdasarkan survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional menunjukkan bahwa posisi daya saing Indonesia dalam bidang usaha kain sesekan atau tenun masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Global Competiti veness Indexyang dikeluarkan oleh World Economic

Forum (WEF) 2013-2014, peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi ke-38 dari 148 negara, naik dari posisi ke-50 dari 144 negara pada tahun 2012-2013. Hal ini menunjukkan suatu peningkatan yang baik. Namun untuk kawasan ASEAN, Indonesia hanya menempati urutan ke-5 di bawah Singapura (2), Malaysia (24), Brunei (26), dan Thailand (37).

*Usaha kain sesekan* atau kewirausahaan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi daya saing dan pertumbuhan suatu negara dan sumber signifikan dari mobilitas sosial. Peran wirausahawan dalam menciptakan nilai dengan memperkenalkan inovasi, membawa perubahan dalam pasar, meningkatkan persaingan, dan menciptakan persaingan menunjukkan bahwa kewirausahaan berkontribusi terhadap kinerja ekonomi.

Di Indonesia, upaya meningkatkan jumlah *pengusaha* terus dilakukan. Menurut Sugiarto, peningkatan rasio jumlah wirausaha terhadap jumlah populasi Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing untuk berkompetisi dengan negara lain. Ploporsi wirausaha Indonesia baru sekitar 0, 24% dari populasi pendudukdan disadari masih sangat kurang untuk mendukung akselerasi pembangunan ekonomi. Padahal untuk membangun ekonomi bangsa yang maju, menurut sosiolog David Mc Cleiland dibutuhkan minimal 2% atau4, 8 juta wirausaha dari populasi penduduk Indonesia (Sugiarto, Eddy Cahyono, 2013, Gerakan Kewirausahaan Nasional Untuk Menyebar Virus Wirausaha, http://setkab.go.id/artikel-7434-gerakan-kewirausahaan-nasional-untuk-menyebar-virus-wirausaha.html Diakses 15 November 2018)

Itulah mengapa budaya *usaha kain sesekan* di Lombok hingga di seluruh Indonesia perlu dikembangkan, meskipun hal itu bukanlah perkara mudah, karena dalam pengembangan *usaha kain sesekan* di Lombok hingga Indonesia mengalami kelemahan dari berbagai sisi, di

antaranya; sisi proses inovasi, kualitas sumber daya manusia, faktor budaya, program pengembangan kewirausahaan, kualifikasi pendidikan, risiko bisnis, pemanfaatan teknologi internet, tingkat korupsi, kesiapan menghadapi era global, ketrampilan memulai usaha, keberanian menghadapi risiko kegagalan, kemampuan membangun jejaring, ketersediaan sumber daya, kemampuan produktivitas, dan orientasi global.

Ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam prose pemberdayaan masyarakat kreatif *usaha kain sesekan* sebagaimana menurut ACS dan Atio, bahwa *entrepreneurial attitudes* dinilai sebagai sikap dalam memahami konsep kewirausahaan dan business start-ups akan mampu melahirkan daya saing. Demikian halnya dengan *entrepreneurial ability*, dijelaskan bahwa menjalankan kegiatan bisnis awal sampai dengan memilih dan mengadopsi teknologi yang sesuai dengan karakteristik operasional akan mampu melahirkan daya saing dalam bentuk efisiensi biaya, kaitannya dengan *entrepreneurial aspiration* juga dijelaskan bahwa strategi yang tepat dalam membangun pasar mulai dari pengenalan produk baru akan mampu menciptakan *image* yang positif.

Sedangkan lima variabel yang meliputi: proses inovasi, kualitas sumber daya manusia, faktor budaya, program pengembangan kewirausahaan, dan kualifikasi pendidikan merupakan titik lemah utama yang membuat spirit *usaha kain sesekan* belum mengakar kuat di Indonesia. Indonesia dinilai berpeluang untuk berkembangnya kegiatan kewirausahaan berkaitan dengan potensi pasar yang besar dan berkembangnya teknologi baru yang mendukung kegiatan kewirausahaan.

Selain faktor budaya, daya saing juga ditentukan oleh kemampuan melakukan inovasi. Rendahnya dana yang dialokasikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan menjadi salah satu

faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan untuk melakukan inovasi. Para pewirausaha di Indonesia belum mampu bergerak pada bidang usaha yang sarat dengan teknologi dan inovasi.

Pendidikan di Indonesia dinilai belum mampu menciptakan budaya inovasi yang kuat, sebuah kondisi yang dibutuhkan bagi tumbuhnya budaya wirausaha. Terdapat situasi yang paradoksal dalam perekonomian Indonesia. Pada saat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat, namun pada saat yang sama peran pendidikan dalam melahirkan para pewirausaha baru masih sangat lemah. Kebanyakan lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi belum memiliki spirit yang kuat untuk menjadi pewirausaha. Setelah lulus pendidikan, umumnya mereka masuk ke pasar kerja untuk *mencari* kerja, dan bukan *menciptakan* pekerjaan.

Sebagaimana dilaporkan dalam "*The EY G20 Usaha kain sesekan Baromater 2013*", kegiatan pendidikan dan latihan; terutama yang diarahkan untuk menumbuhkan spirit berwirausaha; dinilai masih sangat lemah. Lemahnya kegiatan pendidikan dan latihan berdampak lemahnya budaya berwirausaha dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Faktor IT juga menjadi faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat kreatif *usaha kain sesekan*. Dalam era sekarang, kualitas kewirausahaan suatu bangsa dapat diukur dari familiaritas penduduk dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan terciptanya efisiensi ekonomi dan meningkatkan produktivitas. Kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperkuat jejaring kegiatan usaha bisnis dibandingkan dengan negara-negara ASEAN (Acs Z & Autio. E, The Global Entrepreneurship and Development Index: A Brief Explanation, diakses pada tanggal 5

Desember 2018 (http://www.imperial.ac.uk/tanaka/executive-education).

Secara *head-to-head* dengan sesama negara anggota ASEAN, Indonesia pada posisi relatif setara dengan Thailand, relatif unggul di atas Vietnam dan Phillipina; tetapi berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Brunei Darusalam. Meskipun demikian, Indonesia berpotensi untuk memperbaiki posisi karena dari sisi pemanfaatan IT Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Vietnam, Phillipina, dan Thailand.

Perangkat IT oleh lembaga bisnis di Singapura dan Malaysia jauh lebih intensif dibandingkan dengan Indonesia. Bisa dikatakan intensitas pemanfaatan IT di Singapura dan Malaysia dua kali lipat dibandingkan dengan Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada lembaga pemerintahan, di mana Indonesia menduduki posisi keempat di bawah Singapura, Malaysia, dan Brunei. Sedangkan pemanfaatan IT oleh individu di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Thailand. Pemanfaatan IT oleh individu di Indonesia hanya unggul dibandingkan dengan Phillipina.

Pemanfaatan IT secara intensif akan mempengaruhi kegiatan bisnis. Semakin intensif pemanfaatan IT pada sebuah negara, maka kegiatan bisnis di negara tersebut akan semakin berkembang. Makanan secara tidak langsung angka kemiskinan bias turun secara kita tidak menyadarinya Berkembangnya kegiatan bisnis menandakan berkembangnya budaya kewirausahaan, baik dalam bidang pengerajin kain sesekan memperkenalkan khas buya Lombok melalui wisata baik itu di tingkat wisata local nasional hingga mancanegara dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan social menjadi lebih baik.

Dampak pemanfaatan IT terhadap aktivitas ekonomi masih menempatkan Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia,

Brunei, Phillipina, dan Vietnam. Sedangkan dampak pemanfaatan IT bagi terbangunnya kehidupan sosial masih menempatkan Indonesia sejajar dengan Thailand, dan berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Vietnam. Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan IT di Indonesia belum mampu dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif.

Perbandingan daya saing Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya tersebut, menujukkan bahwa Indonesia harus meningkatkan berbagai faktor pendukung mulai dari faktor budaya, inovasi, serta IT. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat kreatif dalam penanggulangan kemiskinan pada pelaku *usaha kain sesekan* harus di mulai dari tingkat terbawah, dan itulah yang menjadi salah satu alasan pentingnya mengembangkan budaya *usaha kain sesekan* perajin tenun di Kecamatan jonggat, sebagai salah satu wujud kontribusi untuk meningkatkan daya saing Negara, hingga membantu mengetaskan kemiskinan.

Kewirausahaan dapat berkembang salah satunya diawali dengan adanya inovasi. Inovasi ini dipicu oleh faktor pribadi, lingkungan, dan sosial. Faktor individu yang memicu kewirausahaan adalah pencapaian *Locus of Control* (kepercayaan seseorang yang mampu mengendalikan lingkungan disekitar), toleransi, pengambilan resiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, usia, komitmen dan ketidakpuasan. Sedangkan yang berasal dari lingkungan ialah peluang, model peran, aktifitas, pesaing, sumber daya dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor pemicu yang berasal dari lingkungan sosial meliputi keluaga, orang tua dan jaringan kelompok (Suryana Yuyus, *Kewirausahaan: Pendektn Karakteristik Wirausahawan Sukses*).

Seperti halnya pada saat perintisan *usaha kain sesekan* atau kewirausahaan yang bergerak di bidang pelestarian budaya local ini,

maka pertumbuhan kewirausahaan sangat tergantung pada kemampuan pribadi organisasi dan lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan kewirausahaan adalah pesaing, pelanggan, pemasok, dan lembaga-lembaga keuangan yang akan membantu pendanaan. Sedangkan faktor yang berasal dari pribadi adalah komitmen, visi, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial. Selanjutnya faktor yang berasal dari organisasi adalah kelompok, struktur, budaya, dan strategi Secara umum, budaya adalah pikiran atau akal budi, atau secara istilah, budaya merupakan cara pandang atau pola asumsi dasar yang dimiliki bersama oleh kelompok ketika memecahkan masalah baik penyesuaian eksternal maupun masalah integrasi internal. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.

## C. INTEGRASI MATA PELAJARAN

Integrasi dalam mata pelajaran merupakan proses penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan dalam kegiatan pembelajaran. Melalui integrasi, diharapkan santri memperoleh kesandaran betapa pentingnya nilai-nilai kewirausahaan, terbentuknya karakter wirausaha dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi mata pelajaran yang dilakukan oleh ustad dan ustadzah dalam kegiatan kewirausahaan didalamnya terdapat mata pelajaran lain yang dikaitkan. Pembelajaran konsep-konsep kewirausahaan diintegrasikan dengan mata pelajaran umum seperti Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Ilmu Agama Islam, Ekonomi disesuaikan dengan karakteristik suatu pembelajaran tertentu. pengintegrasian konsep-konsep kewirausahaan di pesantren disesuaikan dengan sifat dan karakteristik muatan pelajaran yang

harus dicapai santri. Pada mata pelajaran agama guru mengajarkan tentang bertutur kata yang baik, bersikap jujur, tawaduk, berbagi atau bersedekah dari hasil penjualan yang di dapatkan oleh santri.

## D. EKSTRAKURIKULER

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum, kegiatan ini memberikan keleluasaan waktu dan memberikan kebebasan pada siswa, terutama dalam menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan bakat serta minat siswa. Pondok pesantren Al-istiqomah kapu memberikan pelatihan keterampilan kepada santri diantaranya pelatihan seni seperti Latihan vocal suara, musik dan pengelolaan makanan dan minuman sari buah. Pelaksanaan pelatihan keterampilan ini dimulai dari persiapan guru menyiapkan materi yang berasal dari buku, internet dan dari video Youtube. Kemudian santri mulai mempraktekkannya, dalam proses pelatihan ini santri diberikan keluasan untuk mendesain dengan sekreatif mungkin. Hasil karya dari kegiatan pelatihan batik ini kemudian dipajang di etalase pesantren dengan tujuan untuk memotivasi santri lain agar meningkatkan jiwa kreatifnya.

## E. UNIT PRODUKSI

Unit produksi merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan secara berkesinambungan dalam mengelola sumber daya sekolah, sehingga dapat menghasilkan produk dan jasa yang mendatangkan keuntungan. pondok pesantren Al-istiqomah kapu dalam mentrasfer nilai kewirausahaan yaitu santri diikutsertakan dalam proses pengelolaan produksi, santri diberi tanggung jawab untuk mengelola unit produksi yang berada di pesantren diantaranya unit seni dan pengelolaan makanan dan minuman sari buah. Unit produksi ini bukan hanya sekedar label, tetapi memang karya para santri Pondok

Pesantren Al-istiqomah kapu. Banyak inovasi-inovasi jenis varian minuman dari buah yang diciptakan oleh santri diantaranya jus buah original, ada juga rasa campuran seperti mangga susu, ini semua di pasarkan di lingkup pondok pesantren juga bisa di luar pondok dipasarkan oleh ustaz dan ustazah melalui plafom digital.

## F. BISNIS BERBASIS ISLAM

Kewirausahaan atau *usaha kain sesekan* pada awalnya merupakan konsep yang dikembangkan dalam tradisi sosiologi dan psikologi. Pada awal abad ke-18, Richard Cantillon, seorang sarjana kelahiran Irlandia yang besar di Perancis, menyatakan bahwa *usaha kain sesekan* merupakan fungsi dari *risk bearing*. Satu abad berikutnya, Joseph Schumpeter memperkenalkan fungsi inovasi sebagai kekuatan hebat dalam *usaha kain sesekan*. Sejak itu, *usaha kain sesekan* merupakan akumulasi dari fungsi keberanian menggunakan risiko dan inovasi.

Proses kreativitas dan inovasi tersebut lah yang kini dijalankan oleh para peraji kain sesekan di Kecamatan jonggat, yang diwujudkan melalui budaya *usaha kain sesekan* perajin tenun. hal itu bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah bagi produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mendatangkan kemakmuran bagi para perajin itu sendiri. Kewirausahaan merupakan kemampuan melihat dan menilai peluang bisnis serta kemampuan mengoptimalkan sumber daya dan mengambil tindakan dan risiko dalam rangka menyukseskan bisnisnya. Berdasarkan definisi tersebut, kewirausahaan dapat dipelajari oleh setiap individu yang mempunyai keinginan, dan tidak hanya didominasi individu yang berbakat saja.

Mereka yang berani mewujudkan ide menjadi kenyataan lah yang disebut dengan seorang *entrepreneur.* Menurut Joseph Schumpeter, *entrepreneur is a person who perceives an opportunity*

*and creates an organization to pursue it.* Wirausahawan adalah orang yang melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut **(Siswoyo, B.B., "*Kewirausahaan dalam Kajian Dunia Akademik*", (Malang: FE-UM, 2009).**

Siswoyo telah mengidentifikasi beberapa kepribadian seorang *entrepreneur,* yaitu:

1. *Desire for responsibility* yaitu memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap usaha yang baru dirintisnya.
2. *Preference for moderate risk. Entrepreneur* lebih memperhitungkan risiko. *Entrepreneur* melihat peluang bisnis berdasarkan pengetahuan, latar belakang, dan pengalaman mereka.
3. *Confidence in their ability to succeed*. *Entrepreneur* seringkali memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Sebuah studi yang digelar oleh *National Federation of Independent Business (NFIB)* mengemukakan sepertiga *entrepreneur* merasa memiliki peluang sukses sebesar 100 persen.
4. *Desire for immediate feedback*. *Entrepreneur* ingin mengetahui bagaimana tanggapan orang lain tentang cara yang mereka sedang jalankan, dan untuk itu mereka senang sekali jika mendapatkan masukan dari orang lain.
5. *High level of energy*. *Entrepreneur* terkesan memiliki energy yang lebih besar dibandingkan dengan kebanyakan orang.
6. *Future orientation*. *Entrepreneur* mempunyai kemampuan yang baik dalam melihat peluang.
7. *Skill at organizing*. *Entrepreneur* mempunyai kemampuan menempatkan orang sesuai bidang dan kemampuannya.
8. *Value of achievement over money*. Dalam menjalankan bisnisnya, yang menjadi kekuatan utama *pengusaha* adalah sebuah

pencapaian kesuksesan, dan uang hanyalah sebuah simbol untuk menandakan sebuah pencapaian.

Sedangkan menurut Danang Sunyoto seorang *entrepreneur* memiliki beberapa karakteristik, yakni:

1. Disiplin, yaitu usaha untuk mengatur atau mengontrol kelakuan seseorang guna mencapai suatu tujuan dengan adanya bentuk kelakuan yang harus dicapai, dilarang, atau diharuskan.
2. Mandiri, yaitu sikap untuk tidak menggantungkan keputusan akan apa yang harus dilakukan kepada orang lain dan mengerjakan sesuatu dengan kemampuan sendiri sekaligus berani mengambil resiko atas tindakanya tersebut.
3. Realistis, yaitu cara berpikir yang sesuai dengan kenyataan.
4. Komitmen tinggi, yaitu mengarahkan fokus pikiran pada tugas dan usahanya dengan selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang maksimal.
5. Jujur, yaitu mau dan mampu mengatakan sesuatu sebagaimana adanya.
6. Kreatif dan inovatif, yaitu proses pemikiran yang membantu dalam mencetuskan gagasan-gagasan baru serta menerapkannya dalam usaha bisnis yang nyata.

# Bab 3 Nilai-Nilai Ekonomi

## A. MEMBANGUN DESA EKONOMI

Berbicara sosial ekonomi ini menarik dan menyenangkan, karena semua kehidupan ini berkaitan dengan perekonomian, baik ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, ekonomi bangsa dan negara. Bagai dua sisi lempengan mata uang, negara dan pembangunan, sebagai dua unsur yang tidak dapat dipisah satu sama lain. Sebabnya, karena suatu negara, agar dapat mempertahankan kehidupannya, harus giat melakukan pembangunan.

Pembangunan itu sendiri dapat dilakukan melalui berbagai aspek, seperti: pembangunan ekonomi, sosial dan budaya maupun politik serta yang lainnya. Baangkali inilah yang disinyalir Todaro ketika mengungkapkan bahwa: pembangunan merupakan proses multidimensi yang cakupannya yaitu perubahan- perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan institusi-institusi nasional (M.P. Todaro, 1983. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke III Jilid I*, Jakarta: Ghalia Indonesia). Ini menunjukkan bahwa konsep pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Dengan ini kemudian, pembangunan harus merupakan perubahan sosial yang pada prosesnya tidak hanya terjadi pada taraf kehidupan masyarakat semata, tetapi juga pada peran keseluruhan unsur di dalamnya. Dalam hal ini, mereka ini berkelebat di dalamnya, yakni pemerintah dan masayakat. Namun, permasalahan pembangunan yang sering terjadi saat ini adalah masalah pembangunan ekonomi. Hal ini didukung pula

dengan adanya arus globalisasi, sehingga memudarkan batas antar negara dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga identik dengan kemajuan suatu bangsa. Padahal, tingginya tingkat ekonomi suatu negara belum tentu mencerminkan kemajuan dari suatu negara secara keseluruhan, termasuk juga dalam hal ini negara-negara Barat. Terkait ini, menarik kita kutip analisis yang dilontarkan Kunjtoro Jati (1978), bahwa pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan nasional semata ternyata gagal, dilihat dari jurang pendapatan internasional yang tetap lebar. Mereka ini, kata Kunjtoro, biasanya kurang mau mengakui bahwa jurang pendapatan di dalam negerinya sering lebih buruk daripada jurang internasional. Maklum ini menyangkut langsung kepentingan politik (Dorodjatun Kunjtoro Jati, *Mau Kemana Kita dengan Pembangunan Ekonomi Ini?* Majalah Prisma 10, November 1978, hal 10-15).

Beberapa penyebabnya, terkadang masalah-masalah seperti pemerataan pembangunan dan pendapatan, pembangunan sumber daya manusia, bahkan aspek lingkungan sering terabaikan. Selain itu kontak atau hubungan suatu wilayah negara bangsa dengan bangsa lainnya, tidak mampu menularkan nilai-nilai yang menjadi modal kemajuan suatu negara bangsa.

Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau, terdiri dari banyak desa. Bahkan Indonesia merupakan wilayah yang dibangun dan bergantung dari desa. Desa, secara administrasi pemerintahan berada pada level terbawah di negeri ini. Secara kuantitatif jumlahnya lebih banyak bila dibanding kelurahan. Meskipun telah dilakukan kegiatan pembangunan di desa namun masih banyaknya jumlah desa tertinggal dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana. Selain itu desa secara kualitatif tingkat kesejahteraan sosial ekonomi daerah

pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan (Umar Nain, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*, Makasar: Penerbit Garis Khatulistiwa, 2019 hal.23).

Desa merupakan wilayah yang mempunyai potensi alam cukup besar. Dari sumber daya alam tersebut, dapat dijadikan sebagai sumber bahan makanan dan bahan mentah. Sumber daya alam yang dimiliki desa inilah yang dapat dijadikan pendorong untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional. Nah, di sini kian tampak terlihat bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi rakyat yang terbukti bisa menopang perekonomian nasional bahkan pada saat krisis.

Sayang sekali, fakta menunjukkan: kebanyakan desa di Indonesia masih beradadi luar garis arena, artinya tertinggal jauh. Secara kualitatif tingkat kesejahteraan sosial ekonomi daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kenyataan kondisi desa yang seperti itu, desa yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan ekonomi, menjadi terhambat. Salah satu cara untuk meningkatkan atau menggali potensi ekonomi desa agar tidak tertinggal, setidaknya bisa dilakukan pembangunan desa. Dengan adanya pembangunan desa, peningkatanekonomi penduduk desa khususnya di desa tertinggal akan dapat dilakukan sehingga bergeser ke arah desa lebih maju.

Kondisi seperti ini memunculkan sebuah cara atau metode baru dalam hal membangun ekonomi desa yaitu melalui pemberdayaan masyarakat. Yang jadi pertanyaan adalah: bagaimana caranya memberdayakan masyarakat agar bisa menjadi masyarakat yang mandiri dan berpotensi ikut terlibat dalam pembangunan?

Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat bisa menjadi contoh. Selain memang, KLU merupakan salah satu kabupaten yang belum terlalu lama mekar dari kabupaten Induk yakni Lombok Barat. Dari segi jumlah penduduk, KLU cukup banyak. Lima kecamatan terdapat di dalamnya.

Berkaitan topik yang ditulis, penulis ambil contoh salah satu kecamatan Tanjung,tepatnya Desa Sama Guna. Di desa setempat, relatif banyak masyarakat berprofesi sebagai petani. Selain itu, terdapat juga aktivitas sosial ekonomi—dalam hal ini— warganya membuat anyaman. Anyaman yang dibuat, bersumber dari bahan mentah yang tumbuh di desa tersebut seperti bambu, pandan, pisang dan padi. Ini diolah menjadi setengah jadi salah satu contohnya yakni bambu. Bambu ini dipanen jika sudah dianggap cukup pas dijadikan anyaman peraras (wadah nasi dari bambu).

Apa yang dilakukan sebagian warga tersebut, apabila dikelola dengan baik, kemudian masyarakat dan warganya diberdayakan oleh pihak-pihak terkait, bukan tidak mungkin dapat menjadi potensi ekonomi yang luar biasa bagi daerah/kawasan setempat. Maka seyogyanya untuk memberdayakan masyarakat agar bisa menjadi masyarakat mandiri sebagaimana lontaran pertanyaan (yang telah diketengahkan) tadi, dalam hal ini, saya mengemukakan pendapat saya yang berusaha meringkas dengan merujuk tulisan Sihombing yang begitu panjang.

***Pertama*,** pemerdekaan dan pembebasan manusia secara manusiawi. Dengan kata lain, memahami hak-hak dasar manusia secara relasionistis (Memahami ulang hak-hak dasar manusia dalam hubungannya yang nyata dengan alam, hubungannya yang nyata

sesama manusia, relasi sosial budaya dan hubungannya dalam kerangka agama (lihat Maroelak Sihombing, *Partisipasi sebagai Pemerdekaan Manusia, Prisma 11, Nopember 1980*). Dari hak dasar itu, harapannya dapat dipikirkansecara sehat kembali langkah dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan, sasaran yang hendak dicapai, kecepatan laju pembangunan yang diinginkan. Lalu yang tidak kalah pentingnya cara yang dipilih.

***Kedua*****,** partisipasi. Yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah **k**eturutsertaan setiap orang di dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam menguasai dan memelihara alam, bukan sekedar melaksanakan apa yang telah orang lain rencanakan dan putuskan. Perlunya partisipasi, melahirkan kreativitas-kreativitas dari masyarakat setempat. Lebih dari itu, partisipasi dibutuhkan agar upaya-sedikit tidak, dapat membendung dominasi dan egoisme segelintir para pihak yang menentukan dan mengatasnamakan kelompok tertentu.

***Ketiga*****,** pertimbangan-pertimbangan etis. Konsep ini berakar pada keyakinan dasar bahwa manusia sebagai individu dan sebagai kelompok sekaligus terpanggil untuk menentukan dan memikul nasibnya sendiri. Point pertimbangan etis ini juga, berangkat dari putusan untuk memberdayakan, membangun masyarakat mesti berakar dan terarah padakebutuhan dasar masyarakat dan nilai-nilai budaya di tengah sosial kehidupan masyarakat tertentu.

***Keempat*****,** tingkat stabilitas politik. Di tingkat nasional, bahkan global, jika terfokus pada upaya mengejar pembangunan ekonomi lalu melupakan bidang politik menimbulkan kerawanan-kerawanan. Belum lagi, politik tingkat lokal (desa). Jadi, harus ada komunikasi dan strategi yang mampu melebur kebuntuan berfikir kepentingan sesaat

saja, sementara tugas dan tanggung-jawab berikhtiar mengejar kemaslahatan di lupa begitu saja

## B. KONSEP PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Tujuan agar kehidupan masyarakat lebih baik kiranya berkaitan dengan apa yang dimaksudkan Ekonom Inggris, Duley Seers (1969), untuk –Realisasi potensi kepribadian manusia (*lihat Dawam Rahardjo, Pengalaman Pembangunan Dasawarsa 1970-an: Menuju Strategi Alternative, Prisma 11, November 1980, hal. 43*).

Sejalan dengan itu, mengutip pendapat Siagian (2003:4) KPN yaitu pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Sedang implikasi pembangunan diketengahkan Bryant, dkk (dalam Tjokrowinoto, 1999: 47). Ia mensinyalir lima implikasi utama dari pembangunan:

***Pertama***, Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok.

***Kedua***, pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemelorotan nilai dan kesejahteraan.

***Ketiga***, pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.

***Keempat***, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.

***Kelima***, pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu dengan negara yang lain yang menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

Konsep-konsep bila dilihat di atas cukuplah ideal. Tapi kadang se-ideal apapun konsep, tetap membutuhkan penopang-penopang yang menjadi bagian dari cita-cita menyejahterakan masayrakat sebagaimana termaktub dalam Undang-undang dan Pancasila. Sejauh mana kita mencari konsep pembangunan, kendati gagasan dan ide-ide dari barat tidaklah mengapa. Ia bolehlah menjadi acuan dan prototype ideal untuk membangun, asal tetap berlandas pada kultur dan nilai-nilai kebangsaan, agar tercapai pembangunan nasional yang kita cita-citakan bersama.

## C. MENELISIK PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL

Kalau kita berkaca dan menarik sejarah Kembali soal desa, kita harus banyak referensi untuk mengutarakannya seperti apa des aitu sebelumnya dan apa saja perangkatnya yuk kita bahas sekarang dan mari berdiskusi.

Telah menjadi keyakinan publik bahwa bahwa keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan masih merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa. Desa secara administrasi pemerintahan berada pada level terbawah di republik ini secara kuantitatif jumlahnya lebih banyak dari pada kelurahan. Dalam pada itu, meski telah banyak aktivitas pembangunan desa digiatkan, masih banyak jumlah desa tertinggal bila diamati dari ketersediaan sarana dan prasarana. Selain itu desa secara kualitatif tingkat kesejahteraan sosial ekonomi daerah pedesaan lebih rendah bila dibanding daerah perkotaan.

Guna memahami perkembangan pembangunan desa yang

dilakukan selama ini sesuai periode pembangunan, maka ulasan berikut sangat menarik untuk mengetengahkan tinjauan historis pembangunan desa. Sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah, namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan. Perubahan strategi dimaksudkan untuk menemukan strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu. Pada awal kemerdekaan kita kenal ‖Rencana Kesejahteraan Kasimo‖ atau *Kasimo Welfare Plan*. Sebagaimana konotasi awal pembangunandesa sering kali diartikan sebagai identik dengan pembangunan pertanian, maka Kasimo Welfare Plan yang dicanangkan pada tahun 1952 memang berorientasi pada upaya bagaimana kemudian bisa meningkatkan produksi pangan.

Di tengah suatu situasi di mana devisa amat langka, terpenuhinya kebutuhan pangan berarti penghematan devisa. Strategi yang digunakan dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, yang dikenal dengan strategi *olie vlek* atau percikan minyak. Pada lokasi-lokasi yang dipandang kritis diadakan semacam demonstration plot yang memberikan contoh teknik bertani yang baik dengan harapan teknik ini akan menyebar ke daerah sekitarnya. Karena kekurangan, baik dana maupun keahlian, Rencana Kasimo ini tidak mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

Di sekitar tahun 1959 perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa ini makin meningkat sebagaimana terbukti dengan didirikannya departemen yang membidangi pembangunan desa, yaitu Departemen Transkopemada (Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Desa). Fungsi Biro Pembangunan Desa yang

tadinya berada di Kantor Perdana Menteri kemudian dialihkan ke Departemen Transkopemada. Strategi yang digunakan banyak diilhami oleh konsep community development. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Titik tekannya adalah pada pembentukan kader-kader pembangunan masyarakat desa yang diharapkan akan menopang tercapainya masyarakat desa yang berswasembada.

Pembangunan desa pada waktu itu dilaksanakan berdasar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960, yang dirumuskan oleh Biro Perancang Negara. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Oleh karena itu istilah yang digunakan adalah Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun itu menyebutkan bahwa tujuan PMD adalah:

Yakni Meninggalkan taraf penghidupan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan pembangunan yang integral dari pada masyarakat desa, berdasarkan asas kekuatan sendiri dari pada masyarakat desa serta asas permufakatan bersama antara anggota-anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan (kebulatan) dalam rangka kebijaksanaan umumyang sama (Ndraha, Taliziduhu. 1986, *Kemampuan Administratif Pemerintahan Desa dan Peranannya dalam Pembangunan Desa*, Yogyakarta: Disertasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).

Demikianlah selayang pandang tentang pembangunan desa. Berangkat dari uraian di atas, bisa dinyatakan bahwa pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan tiga azas. Azas pertama yaitu pembangunan integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan bersama (Tjokrowinoto, 2007:36). Adapun ke 3 (tiga)

azas tersebut adalah:

*Pertama*. Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya), sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan yang tidak berat sebelah. Tetapi perlu diingatbahwa untuk masa permulaan titik berat terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.

*Kedua*. Azas kekuatan sendiri ialah bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu- nunggu pemberian dari pemerintah. *Ketiga*, azas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan. Namun kini, desa sudah terus mengalami perubahan-perubahan seiring perhatian pemerintah yang terus meningkatkan dana desa. Tujuan dari itu, jelas untuk pembangunan desa.

Menurut UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa, desa memberikan gambaran bahwa desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem negara Kesatuan republik Indonesia. Sedang Adisasmita (2006) mendefinisikan bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Desa tertinggal identik dengan kondisi desa yang miskin dan terbelakang. Tentang hal itu, diungkap juga oleh Ekonom seperti Mubyarto. Kata Mubiyarto

(1994:24) yang getol menyuarakan ekonomi Rakyat itu, –Desa Tertinggal merupakan kawasan pedesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan atau perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan). Problem keterbelakangan (*underdevelop-ment*) ini, adalah problem yang juga dihadapi negara-negara sedang berkembang. Sebab dari ketebelakangan ini mau tak mau, bisa dibilang, sebagai imbas dari keterhubungan satu negara dengan negara lain yang semata-mata mengeksploitasi sebuah negara.

Sejalan dengan pendapat Frank (1984)sebagaimana dikutip Unain (2019) mengemukakan bahwa keterbelakangan merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Kontak dengan negara-negara maju tidak menularkan nilai- nilai modern yang dibutuhkan pembangunan, tetapi sebaliknya dia membutuhkan suatu kolonialisme di dalam negeri yang dilakukan oleh kaum elite dari negara- negara berkembang yang bekerja sama dengan kaum pemodal dari luar negeri dan mengeksploitir rakyat miskin di negeri tersebut.

Praktik demikian, maka masyarakat menjadi terbelakang dalam segala hal. Kekayaan alam yang melimpah ruah di dalam suatu masyarakat, dimanfaatkan oleh segelintir kelompok elit yang bekerjasama untuk melakukan itu.

Masyarakat tak berdaya melawan. Meski membangun kekuatan-kekuatan, apa yang diinisiasinya untuk melakukan pemberontakan sepertinya dengan mudah ditakalukkan oleh elit-elit karena mereka punya kekuatan yang lebih untuk melawan.

Swasono (dalam Rintuh, dkk 2005:84) menyatakan bahwa

pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut Suryana (2006:6) mengutip pendapat Goulet pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Menurut definisi Bank Dunia, globalisasi adalah proses integrasi ekonomi dan masyarakat melalui arus informasi, ide, aktivitas, teknologi, barang, jasa, modal dan manusia antarnegara (Stren, 2000: 45).

Nah lantas sekarang bagaimana pemerintah daerah dan kabupaten bisa mengayomi, mendampingi dan membantu masyarakatnya dalam memasarkan hasil karya mereka, seperti contoh dari pisang, pisang akan dipanen jika sudah dianggap buahnya cukup pas untuk dipetik agar tidak terjadi rasa yang berbeda, pisang ini adalah bahan mentahnya kemudian akan terjadi menjadi barang setengah jadi kemudian diolah menjadi pisang sale,

pisang goreng, dan keripik pisang. Ini pemasarannya masih di lingkungan kampung atau sekitar dusun saja tempat mereka menjualnya, kemudian bahan mentah yang dari bambu masyarakat desa sama guna mereka sulap jadi tusuk sate dan bakul ini kekuatannya bisa sampai puluh tahunan karena alamiah cuman pemasarannya yang masih kurang tidak bisa di post di mediasosial seperti market ples atau whats'up bisnis dan lain-lain. Selanjutnya ada lagi anyaman dari pandan mereka sulap menjadi tikar tradisional mengulat tikar ini adalah peninggalan nenek moyang mereka yang terus mereka jaga dan lestarikam saya takut tradisi seperti ini akan hilang jika tidak di pertahankan lalu pemerintah andil dalam menjaga tradisi masyarakat yang bagus ini agar kerajinan sepertini bisa ditemukan sampai anak cucu nanti, kalua boleh saya berikan Bahasa pesantrennya begini *"Almuhafhazathu Alalkhodimissholeh Wal ahdubbil jadidil Asylah"* (artinya menjaga tradisi lama yang baik itu adalah kebaikan yang sangat bagus dan kita mengambil tradisi baru itu yang lebih baik). Tradisi lama yang baik kita harus pertahankan seperti kesenian anyaman tradisional dan silaturrahim, kemudian kita juga jangan ketinggalan di era digital ini kita harus peka siap terlibat di arus globalisasi yang serba internet dan era modernism, maksudnya adalah agar kita bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, ekonomi kita bisa maju jika kita bisa memanfaatkan teknologi—sebab, mau tidak mau siap tidak siap kita sudah berada di ruang dunia global yang semua umat manusia di seluruh penjuru dunia bisa terhubung melalui internet serba online, kita harus masukan barang tradisional kita dan apa saja yang bisa di jual di dunia maya kita harus ikut supaya bisa menopang kecepatan dan kesejahteraan ekonomi baik ekonomi keluarga, masyarakat hingga ekonomi atau pendapatan negara.

Kalau dulu, kita dikagetkan, dibuat *takjub* juga *silau* oleh

perkembangan hidup bernama arus globalisasi, lalu berkembang menjadi revolusi industri kini kitasedang berada pada era komunikasi digital. Kehidupan terus berubah, perubahan demi perbahan terjadi, dan akan terus mengalami itu. Penulis yang banyak menulis buku-buku tentang filsafat dan topik-topik kewirausahaan islami seperti Asyari (2002:10) mengungkapkan, –Hiduplah tidaklah statis dan selesai, karena sesuatu yang statis adalah mati, sedangkan selesai adalah hidup yang sudah berakhir.

Dalam paradigma dunia, kehidupan yang telah kian berubah itu, dan desa menjadi bagian di dalam suatu bangsa yang turut serta merasakan itu, maka mau tidak mau, desa sebagai bagian penting dari perubahan itu, harus mamupu dan ikut mendorong Indonesia untuk segera mengubah sudut pandang hidup di desa. Jika tidak cita-cita pembangunan sulit dapat digapai. Itu semua, seyogyanya menjadi kekuatan untuk berada dalam kehidupan dan siklus pembangunan yang tak akan pernah berjalan statis.

## D. DAMPAK WISATA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Beberapa tulisan dalam judul ini, berasal dari materi yang pernah disampaikan penulis saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pandu Digital. Awalnya hanya berbentuk file ringkas yang penulis sajikan melalui power point kepada seluruh peserta seminar. Pokok-pokok pikiran, berupa paragraf, pernah juga penulis posting dan share di dinding media sosial sebagai status. Tujuan untuk itu, tak lain dan tidak bukan, sekedar untuk berbagi informasi saja. Lebih dari itu menebar inspirasi.

Penulis awali dulu, dengan mengetengahkan hal-hal yang terkait dengan apa itu pariwisata?

Istilah wisata dan *pariwisata, wisatawan* dan *kepariwisataan* merupakan empat hal penting yang perlu difahami lebih awal. Hal ini penting karena keempat hal itu sebagai hal mendasar bila berbicara tentang pariwisata.

Wisata, berarti perjalanan (Travel). Sedangkan pariwisata yaitu perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain. Disebut juga "*Tour*" dalam bahasa Inggris. Sementara wisatawan, yaitu orang yang melakukan perjalanan (*travelers*). Sedangkan kepariwisatan dapat berarti hal–hal yang berhubungan dengan pariwisata dan dalam bahasa Inggris disebut dengan "*Tourisme"*.

Definisi di atas, menggambarkan beberapa hal tentang pariwisata. Dengan demikian, secara konsep dan praktis, keempat hal tersebut menjadi bagian penting dalam pembicaraan tentang pariwisata.

"Pengertian Pariwisata"

Pariwisata telah menjadi kebutuhan setiap insan. Sebagai asas kebutuhan maka setiap individu merasa pantas untuk berwisata, mengelilingi dan atau berkunjung ke suatu tempat baik dalam wilayah lokalitas (dalam negeri) maupun mancanegara (luar negeri) yang sama sekali belum pernah dikunjungi. Sebagai kebutuhan setiap insan dan setiap insan dibolehkan untuk bepergian ke suatu tempat maka pariwisata menjadi fenomena global yang digandrungi jutaan manusia di muka bumi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Pariwisata, maka perlu dikemukakan definisi mengenai pariwisata, baik secara etimologis maupun terminologis.

Konsep sederhana mengenai Pariwisata adalah perjalanan untuk bersenang-senang. Namun, secara *etymologis* kata "pariwisata" berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari tiga suku kata sebagai

berikut: Pari: berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap (ingat kata paripurna); *Wis* (*man*): berarti rumah poperti, kampung, komunitas Ata: berarti pergi terus-menerus, mengembara (*roaming about*).

Berdasarkan pengertian di atas, “pariwisata” berarti bepergian sepenuhnya meninggalkan rumah, kampung halaman, tempat tinggalnya untuk berkeliling. Istilah pariwisata di Indonesia munsul pada awal tahun 1960 yang merupakan usulan presiden Soekarno kepada Sultan Hamengku Buwono IX selaku Ketua Dewan Tourisme Indonesia (DTI).

Pengertian atau definisi “pariwisata” mengalami dinamika dan perkembangan, dengan demikian, terdapat berbagai kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya terletak pada keinginan manusia untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke tempat lain yang didorong oleh rasa ingin tahu untuk merasakan atau mengalami sendiri keindahan suatu objek wisata. Sedangkan, perbedaannya terletak pada pengutamaan bagian tertentu dari definisi tersebut berdasarkan sudut pandang atau kepentingannya.

Herman V. Schulalard, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Austria memberikan batasan akan pengertian pariwisata sebagai berikut: “*Tourism is the sun of operations, mainly of an economic nature, which directly related to the entry, stay and movemet of foreigner inside certain country, city or region”.*

Menurut pendapatnya, yang dimaksud dengan pariwisata adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan dating dan menetapnya serta bergeraknya wisatawan dalam suatu kota, daerah atau negara. Karena batasan ini diberikan oleh seorang ahli ekonomi, maka sifatnya lebih banyak ditekankan pada aspek-aspek ekonomi,

tetapi tidak secara tegas menunjukan aspek-aspek sosiologis, psikologis, seni-budaya maupun aspek geografis kepariwisataan.

Pengertian yang lebih bersifat teknis dikemukakan oleh Prof. Huzieker dan Prof. K. Krapf sebagai berikut:

*"Tourism is the totally of the relationship and phenomena arising from the travel and stay of strangers (Ortsfremde), provide the stay does not imply the establishment of a permanent resident".*

Huzieker dan K. Krapf menyatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh suatu perjalanan dan menetapnya orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, di mana hal tersebut tidak bersifat permanen dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang dilakukanya. Batasan yang diberikan oleh Huzieker dan K. Krapf merupakan pengertian yang dapat diterima secara resmi oleh The *Association International des Experts Scientifique du Tourisme (AIEST).*

*"Dampak Pariwisata Terhadap Perekonomian"*

Membincang pariwisata, kita pasti digiring untuk mendiskusikan bagaimana pariwisata member dampak bagi suatu daerah yang mengembangkan pariwisata. Untuk itu, sangat tepat kirannya, mengetengahkan bahwa: salah satu isu strategis pembangunan pariwisata adalah bagaimana meningkatkan kontribusi pariwisata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata. Secara umum, makin besar kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah, makin besar pula kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut:

Secara umum, terdapat dua hal sebagai dampak hadirnya pariwisata di tengah arus deras kedatangan beragam orang secara global. ***Pertama*** ada dampak positifnya. Yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil, menengah, hingga ke atas. Bagi kelompok ini, berimbas terhadap aktivitas sosial ekonominya seperti: dari segi penjualan barang hasil pengrajin, penginapan hingga paket-paket lain yang tersedia, dapat mereka tawarkan, jual. Dari situ kemudian keuntungan bisa didapat.

***Kedua*** dampak negatif. Yakni dengan tidak sadar pergeseran budaya lokal, hingga munculnya budaya westernisasi. Akibat dari dampak negatif ini, berpotensi bahkan akan dan mungkin sedang terjadi kekhawatiran seperti banyaknya terjadi perampokan, pemerasan, hingga pemerkosaan. Itulah sekelumit gambaran perihal pariwisata.

Tak heran, kemudian, hari ini, dan mungkin seterusnya, pariwisata terus mendapatkan atensi tidak hanya dari masyarakat itu sendiri, melainkan juga pemerintah. Sebabnya mungkin karena pariwisata memiliki dampak yang sangat besar bagi aktivitas sosial ekonomi.

Sayangnya, sejak isu pandemic global covid-19, berbagai sector dan bidang kehidupan telah mengalami perubahan drastis, tak terkecuali pariwisata. Untuk itu, dalam tulisan ini, menjadi menarik menguak bagaimana trend pariwisata di tengah gejolak pandemic yang sampai saat ini, menjelang tahun 2021, masih dirasakan belum menunjukkan tanda kapan berhenti. Kita hanya bisa berharap itu semua cepat berlalu, agar kehidupan kembali berjalan seperti biasa: normal.

*“Trend Pariwisata Saat Pandemi Covid 19”*

Pandemi Covid-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Tidak main-main, sejak Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan sangat drastic. Puncaknya terjadi April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158 ribu, sesuai dengan data yang kami rangkum pada Buku Tren Pariwisata 2021 yang diterbitkan oleh Kemenparekraf/Baparekraf. Dalam kondisi itu, tentu tidak hanya masyarakat yang merasakan dampak tetapi juga pemerintah. Pun tidak hanya di negeri yang kita cintai ini, tetapi juga menjadi momok bagi negara-negara di dunia.

Saya menyampaikan beberapa hal terkait pariwisata dan pandemic covid-19, dalam kesempatan berdiskusi, berdialog. Mislanya, bagaimana dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata Indonesia juga terlihat dari pengurangan jam kerja. Sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja, dan 939 ribu orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja.

Di sisi lain, Pandemi Covid-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Menurut data BPS 2020, sekitar 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Dalam pada itu, penulis juga mengemukakan sejumlah langkah secara umum untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia yakni melalui tiga fase-penyelamatan‖ yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), yaitu Tanggap Darurat, Pemulihan, dan Normalisasi.

Fase Tanggap Darurat fokuskan pada kesehatan, seperti menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas saat WFH, melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan daerah pariwisata, serta melakukan persiapan pemulihan.

Selanjutnya, pada pemulihan kedua, adalah fase Pemulihan, di mana dilakukan pembukaan secara bertahap tempat wisata di seluruh Indonesia. Persiapannya sangat matang yakni, mulai dari penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability) di tempat wisata, serta mendukung optimalisasi kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di Indonesia. Sedang pemulihan ketiga, fase Normalisasi. Pada tahapan ini yaitu persiapan destinasi dengan protokol CHSE, meningkatkan minat pasar, hingga diskon untuk paket wisata. Selain itu, perlu juga dikembangkan pariwisata alternative, di tengah maraknya berbagai model dan pengembangan pariwisata juga desa wisata. Apa itu pariwisata alternatif?

Nengah Subadra mengutip pendapat (Sumarwoto, 1995: 314) mengemukakan bahwa pariwisata alternatif merupakan pariwisata yang berupaya untuk memberikan situasi saling pengertian, solidaritas dan keadilan diantara wisatawan, pelaku pariwisata dan masyarakat lokal dan lingkungannya. Tujuan dikembangkannya pariwisata alternatif adalah: (1) Untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan wisatawan; (2) Untuk memberikan peluang kepada pengusaha penyedia jasa pariwisata untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak; (3) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dengan cara melibatkan langsung dalam pengembangan pariwisata alternatif; (4) Untuk melestarikan objek-objek pariwisata seperti kebudayaan dan alam.

Peran Pesantren Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Syariah (materi ini pernah disampaikan dalam seminar pandu digital) Belakangan, kita bisa banyak membaca dari berbagai majalah, Koran dan situs-situs di internet tentang bombastisnya pertumbuhan ekonomi islam yang di tanah air lebih popular dengan sebutan: ekonomi syariah. Artikel menarik yang ditulis Mashur, berjudul, Perkembangan Ekonomi Islam Sebuah Catatan‖ (Perkembangan Ekonomi Islam Sebuah Catatan, terbit di harian Lombok Post, tahun 17 Februari 2006) bisa kita perhatikan tentang bagaimana perkembangan ekonomi syariah di tanah air. Mashur menulis: Perkembangan ekonomi Islam (*growth of islamic economic*) yang makin marak seakan mencerminkan kerinduan yang amat mendalam dari segenap umat Islam. Khususnya seorang pedagang, seorang investor, bahkan pengusaha yang berbisnis dengan senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dan taawwun akan makin diridhoi Tuhan azza wajalla.

Lebih jauh, ia menguraikan: Ekonomi Islam dalam beberapa dekade mengalami kemajuan yang amat pesat, baik dalam tataran kajian maupun praktik operasional. Dalam bentuk pengajaran, konon katanya, di berbagai media (cetak eletronik) menyebutkan, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun di negara- negara barat, seperti Inggris, USA, Australia, dan lainnya. Masih menurut dia, dalam bentuk praktek, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk lembaga perbankan dan juga lembaga-lembaga Islam non-bank lainnya. Sampai saat ini, lembaga perbankan dan lembaga keuangan Islam lainya telah menyebar ke 75 negara termasuk ke negara barat.

Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan implementasi pelaksanaan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi Islam telah diajarkan di

beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hadirnya Bank Muammalat menjadi momentum penuh makna bagi ekonomi Islam. Berbagai atribut penting pendukung lajunya sistem ekonomi pun mulai dikemas dan dibuat sedemikian rupa, ini terbukti setelah lahirnya UU No. 7 Tahun 1992, UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).

Menurut catatan Ikhwan A. Basri, salah seorang Ahli Direktorat Bidang Syari'ah Lembaga Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta Perkembangan implementasi ekonomi Islam, yang di Indonesia lebih dikenal dengan ekonomi syari'ah, telah mengalami dinamika demikian pesat. Bahkan dalam implementasinya diberbagai bidang, seperti keuangan dengan perbankan dan asuransinya, hingga lembaga keuangan non-bank, pasar modal, reksadana dan perdagangan umum atau khusus telah berhasil menawan semua kalangan, termasuk kaum profesional di negeri ini karena ke-khasan operasional dan prestasi kinerjanya.

Ekonomi Islam adalah bagian penting dari ekonomi global saat ini. Ada tujuh sektor ekonomi Islam yang telah meningkat secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Di mana keseluruhan sektor itu mengusung konsep halal dalam setiap produknya (*Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah,* 2015, hal.1)

Nowadays, di era komunikasi digital yang sedemikian canggih ini, bagaimana perkembangan ekonomi syariah, informasinya kian mudah kita dapati. Kita mendengar di sebaran dinding-dinding media sosial, dan dari mulut ke mulut pesatnya perkembangan perbankan dan keuangan syariah di dunia turut mempengaruhi sektor bisnis lainnya; salah satunya adalah bisnis pariwisata.

Saat ini bisnis pariwisata berdasarkan syariah telah berkembang dengan pesat. Pariwisata syariah memiliki potensi bisnis yang besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Master Card dan Crescent Rating tentang *Global Muslim Travel Index* 2015', tersaji data bahwa di tahun 2014 terdapat 108 juta Muslim yang telah melakukan perjalanan dengan menghabiskan biaya U$145 milyar. Angka ini merepresentasikan sekitar 10% dari total ekonomi wisata global. Pada tahun 2020 para wisatawan Muslim diprediksi akan meningkat menjadi 150 juta dengan biaya yang dikeluarkan sebesar U$200 milyar. Ke depan, wisatawan Muslim akan terus meningkat dan menjadi salah satu sektor pariwisata yang berkembang pesat di dunia. Secara khusus, Mashur (2019:14), mengungkapkan, faktor-faktor lain juga sangat potensial, terutama sekali trend makanan halal yang semakin digandrungi publik secara global. Dengan mengambil rujukan dari Laporan Pew Research *Center Forum on Religion & Public Life* (2017) Mashur menjelaskan: bahwa populasi Muslim dunia diperkirakan akan meningkat sekitar 35 persen dalam 20 tahun mendatang, naik dari 1,6 miliar pada 2010 menjadi 2,2 miliar pada 2030. Di sisi lain, Surkes (2017) menyebut antara 2010 dan 2050 penduduk Muslim memiliki tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan sekitar 73 persen. Pertumbuhannya akan lebih cepat daripada rata-rata pertumbuhan 2050, populasi Muslim Global akan menandingi Kristen pada 2060 (lihat Mashur, *Magnet „halal", Menuju Pusat Wisata Dunia*, Suara NTB, Selasa, 29 Oktober 2019).

Pandangan lain mengemukakan bahwa Pada tahun 2030 populasi Muslim diprediksi mewakili 26,5% populasi dunia. Mayoritas populasi Muslim berasal dari negara yang ekonominya sedang berkembang seperti Indonesia, Turki, dan Negara-negara Teluk. Oleh karena itu, Muslim merupakan konsumen penting dalam semua sektor

bisnis, termasuk bisnis pariwisata. Dalam melakukan perjalanan, keyakinan (faith) turut mempengaruhi wisatawan Muslim dalam memutuskan tempat wisata yang akan mereka tuju. Mereka tentu akan mencari dan membutuhkan produk-produk dan layanan-layanan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini terlihat dengan semakin pesatnya pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah, pangan halal (halal food), dan lain-lain di dunia.

## E. EKONOMI GOTONG ROYONG

Saya merasa perlu meminjam pribahasa di atas sebagai judul essai yang saya buat ini. Pribahasa itu saya comot sebagai judul Essai yang saya tulis kali ini, sebab ada kaitannya dengan aktivitas saya beberapa waktu lalu. Yakni membawa nama lembaga yang saya kelola untuk turut serta ikhtiar menebar kebaikan. Dengan kata lain, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yakni Ibunda Dra. Hj Wartiah, MPd Bersama Kajian Pemuda Rakyat (KAPER) Nusa Tenggara Barat turun langsung ke masyarakat pelosok desa Se-Pulau Lombok membantu masyarakat. Ikut serta juga Bank Indonesia (BI) yang merupakan mitra kerja dari DPR RI Komisi sebelas. Untuk kali ini titiknya di dusun Lender Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok tengah. Pasa giat Senin (8/11) saya mewakili bunda Wartiah dan BI menyalurkan paket sembako kepada warga terdampak Covid. Juga terdampak banjir yang terjadi beberapa waktu lalu.

Bahwa ikut serta membantu masyarakat di tengah kondisi saat ini sangat diperlukan bagi orang/kelompok yang memiliki kelebihan rizki. Juga individu atau kelompok yang punya program bantuan sosial untuk masyarakat. Saling membantu, merupakan gambaran prinsip gotong royong. Gotong royong sendiri adalah budaya luhur dari

bangsa kita. Dan ia tak lain dari prinsip yang mengusung kebersamaan dalam upaya dan ikhtiar menyelesaikan sebuah persoalan. Gotong royong di sini, yang dimaksudkan yaitu: untuk segala sesuatu yang bermakna kebaikan (positif). Bukankah kalau untuk tujuan sesuatu yang membawa manfaat kebaikan, tak perlu untuk ditunda-tunda? Saya yakin semua kita sepakat.

"*Budaya Gotong Royong jangan Sampai Memudar*"

Zaman kadang edan. Kita lihat sendiri, akibat IPTEK, perubahan sikap dan perilaku masyarakat berubah. Seiring itu, perlahan budaya gotong royong berangsur-angsur bisa memudar. Masyarakat lebih disibukkan dengan kepentingannya sendiri, kurang begitu peduli (care it) dengan orang lain. Lebih dari itu, rasa empati terhadap sesama juga terkesan lenyap. Ini pula penyebab kian memudarnya pergeseran budaya gotong royong ke budaya individualistik. Efeknya: terjadi gap (jarak) antar masyarakat. Pada konteks ini. masyarakat seolah lupa bahwa kita adalah bagian dari bangsa yang besar, bangsa yang merdeka. Dengan persatuan dan kesatuan mestinya kita adalah satu: satu nusa satu rasa yakni persaudaraan.

Saya teringat ungkapan Bung Karno: Marilah kita menyelesaikan gawe belek kita, pekerjaan, amal ini, Bersama-sama Gotong-Royong adalah pembantingan tulang Bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. HOLOPIS-KUNTUL-BARIS buat kepentingan Bersama! Itulah Gotong-Royong ‘‘.

Sepintas mencermati ungkapan sang proklamator RI itu, kita disadarkan hakikat gotong royong. Ia tak hanya kerjasama yang bikin kita bersatu tetapi nilai gotong- royong sangat luhur. Gotong royong inilah yang menjadi landasan berpijak (kokohnya negeri ini). "Berat sama dipikul ringan sama dijinjing, demikian bunyi Pribahasa. Isyarat

bahwa dalam hidup yang sementara ini, saling tolong menolong, adalah sesuatu yang tak boleh lenyap dalam hidup-kehidupan kita.

*“Realisasi Nilai Ekonomi Islam”*

Kita mafhum apa itu gotong royong. Ia sebagai suatu action antar satu individu dengan individu lain. Ia meurpakan satu cermin dari tolong menolong. Jika ia 'tolong menolong', maka Sejauh yang saya tahu tolong menolong adalah basic principle of economic atau prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Juga asas Ekonomi Islam. Tolong menolong ialah aksi sekaligus kerja-kerja kemanusiaan. Ia tak lain sebagai elemen dari doktrin yang mendasar ketika dihubungkan dengan penciptaan alam sebagai karunia Tuhan yang harus dikelola sebaik mungkin.

Syirkah misalnya. Akad syirkah ini selain bisa diterapkan dalam akad koperasi, juga bisa dipraktikkan dalam konteks yang lain. Misalnya kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, seperti kerjasama yang terjalin antara anggota dewan dengan BI dan lembaga yang saya kelola Lembaga Kajian Pemuda Rakyat Nusa Tenggara Barat KAPER NTB.

Menarik diketengahkan **QS. Al-Maidah ayat 2** berikut:

*“Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan”.* Ini artinya bahwa sudah menjadi perintah kepada umat manusia untuk saling tolong menolong baik. Dengan tolong menolong, yang sulit jadi gampang.

Dewasa ini, tolong menolong harus bisa diterjemahkan lebih kontekstual, relevan dengan kondisi zaman yang kita hadapi. Artinya

bahwa kita harus bisa menyadari betapa dahsyatnya manfaat gotong royong. Praktiknya bisa beraneka rupa. Asal tetap dalam cita-cita kebaikan. Jika ini mampu dilakukan, maka seseorang bisa masuk kategori berfikir cerdas. Orang cerdas adalah orang yang tidak kehabisan dengan satu cara, tetapi ia selalu memiliki banyak cara untuk melakukan segala sesuatu.

# Bab 4 Pondok Pesantren dan Strategi Ekonomi

## A. PENGERTIAN PONDOK PESANTREN

Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji pesantren sering disebut juga sebagai "Pondok Pesantren" berasal dari kata "santri" menurut kamus bahasa Indonesia, kata ini mempunyai dua pengertian yaitu.

1) Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh orang saleh,
2) Orang yang mendalami pengerajinnya dalam Agama Islam dengan berguru ke tempat yang jauh. (Team Penyusunan Kamus Besar, 1990.

Pondok Pesantren juga merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pondok dan pesantren. Kata pondok (kamar, gubuk, rumah kecil) yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Ada pula kemungkinan bahwa kata pondok berasal dari bahasa arab "funduk" yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Pada umumnya pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya (Ziemek, 1986). Sedangkan kata pesantren berasal dari kata dasar "santri" yang dibubuhi awalan "pe" dan akhiran "an" yang berarti tempat tinggal para santri (Dhofier, 1994).

Menurut beberapa ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Zamakhsyari antara lain: Jhons, menyatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan CC. Berg berpendapat bahwa istilah ini berasal dari istilah shastri yang

dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-bukusuci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. (Dhofier, 1994).

Nurchalish Madjid pernah menegaskan, pesantren ialah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik dan indigenous. (Amir Haedari dkk, 2004). Mastuhu memberikan pengertian dari segi terminologis adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Indra, 2004).

Secara etimologis pondok pesantren merupakan satu lembaga kuno yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan agama. Ada sisi kesamaan (secara bahasa) antara pesantren yang ada dalam sejarah Hindu dengan pesantren yang lahir belakangan. Antara keduanya memiliki kesamaan prinsip pengajaran ilmu agama yang dilakukan dalam bentuk asrama. Secara terminologi, KH. Imam Zarkasih mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya (Wiryosukarto, et al., 1996). Pesantren sekarang ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khas tersendiri. Lembaga pesantren ini sebagai lembaga Islam tertua dalam sejarah Indonesia yang memiliki peran besar dalam proses keberlanjutan pendidikan nasional. KH. Abdurrahman Wahid, mendefinisikan pesantren secara teknis, pesantren adalah tempat di mana santri tinggal (Wahid, 2001).

Definisi di atas menunjukkan betapa pentingnya pesantren sebagai sebuah totalitas lingkungan pendidikan dalam makna dan nuansanya secara menyeluruh. Pesantren bisa juga dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.

Di tengah keblusetan hidup, persoalan pelik kehidupan bak bola salju yang makin lama kian membesar dan siap menggelinding menerjang kapan saja. Seperti tidak ada solusi untuk memecah bola salju tersebut. Namun demikian, atau setidaknya, dengan goyong royong kita menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Gotong royong sebagai ejawantah dari nilai ekonomi Islam, tak syak lagi harus tetap tumbuh. Ia mesti dipraktikkan dalam hidup dan kehidupan kita karena memang sejalan dengan falsafah hidup bangsa yang ada dalam Pancasila yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri harus diakui memiliki kesamaan tujuan untuk mengikhtiarkan sekaligus mencapai kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi ummat. "*Hendaklah Harta Tidak Beredar Pada Kalangan/Kelompok Tertentu*," demikian pesan Tuhan dalam Al-Qu'ran surat Al-Hasyr ayat 10.

Masih tentang gotong royong yang memiliki kesamaan dengan Pancasila, dalam suatu kesempatan, presiden Joko Widodo saat peringatan hari koperasi nasional yang ke-69 tahun 2016 silam pernah menyatakan: Ekonomi gotong royong adalah cerminan ekonomi nasional. Ekonomi yang benar adalah ekonomi pancasila, konomi yang betul adalah ekonomi gotong-royong.

Demikianlah. Mengacu pada pidato bapak presiden, Itu menunjukkan betapa gotong royong menjadi bagian yang sangat

penting dalam system ekonomi dan kehidupan masyarakat bangsa, etrlebih di tengah kondisi Pandemi covid-19.

Akhirul kalam, terima kasih tak terhingga, penulis sampaikan kepada bunda Wartiah. Juga bank Indonesia perwakilan NTB yang memberikan kepercayaan pada saya. Juga orang-orang yang pernah melibatkan saya dalam berbagai kegiatan positif dan membawa segudang faedah. Akhirul kalam, semoga semua kita tak pernah membiarkan jari jemari kita, tangan kita, seluruh apa yang kita miliki untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Bukankah manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesame. *“Sebaik-baik manusia adalah yang baik terhadap sesamanya,”* demikian bunyi sebuah hadist.

## B. FUNGSI PONDOK PESANTREN

Lahirnya suatu pondok pesantren berawal dari beberapa unsur yang selalu ada didalamnya. Ada lima unsur-unsur pondok pesantren antara satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Kelima unsur tersebut meliputi kayi, santri, pondok, masjid, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik, atau yang sering disebut dengan kitab kuning.

### 1. Kyai

Kyai atau pengasuh pondok pesantren merupakan elemen yang sangat esensial bagi suatu pesantren. Rata- rata pesantren yang berkembang di Jawa dan Madura sosok kyai begitu sangat berpengaruh, kharismatik, dan berwibawa, sehingga amat disegani oleh masyarakat di lingkungan pesantren. Disamping itu, kyai pondok pesantren biasanya juga sekaligus sebagai penggagas dan pendiri dari pesantren yang bersangkutan. Oleh karenanya, sangat wajar jika dalam pertumbuhannya, pesantren sangat bergantung peran seorang kyai (Haedari, dkk, 2004.) Menurut asal – usulnya, perkataan kyai

dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda yaitu (Dhofier, 1994):

a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat umpamanya "kyai Garuda Kencana" dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di keraton Yogyakarta.
b. Gelar kehormatan untuk para orang-orang tua pada umumnya.
c. Gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab – kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kyai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).

Dalam perkembangannya, gelar kyai tidak lagi menjadi monopoli bagi para pemimpin atau pengasuh pesantren. Gelar kyai dewasa ini juga dianugerahkan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang ulama yang mumpuni dalam bidang – bidang ilmu agama, walaupun yang bersangkutan tidak memiliki pesantren. Dengan kata lain, bahwa gelar kyai tetap dipakai bagi seorang ulama yang mempunyai ikatan primordial dengan kelompok Islam tradisional. Bahkan dalam banyak hal, gelar kyai ini juga sering dipakai oleh para da'i atau muballigh yang biasa memberikan ceramah agama (Haedari, dkk, 2004.)

**2. Pondok (Asrama)**

Istilah pondok kemungkinan berasal dari bahasa yaitu kata "funduk" yang berarti penginapan atau hotel. Tetapi kata pondok itu khususnya dalam pesantren lebih mirip sebagai pemondokan dalam lingkungan padepokan yaitu perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam kamar merupakan asrama bagi para santri (Djaelani, 1983).

Ada tiga alasan pondok pesantren menyediakan pemondokan bagi santri. Pertama, kemasyhuran seorang kyai, kedalaman pengetahuan agamanya menarik santri-santri dari jauh untuk menuntut ilmu dari kyai tersebut sehingga untuk dapat memaksimalkan diri menuntut ilmu santri harus menetap di dekat kediaman kyai. Kedua, hampir semua pesantren berada di desa-desa terpencil di mana tidak tersedia perumahan atau penginapan yang cukup untuk santri, dengan demikian secara tidak langsung perlu adanya asrama bagi santri jauh. Ketiga, ada sikap timbal balik antara kyai dan santri, di mana para santri menganggap kyainya seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, dan kyai menganggap para santri sebagai titipan Allah yang harus dilindungi. Sikap saling membutuhkan ini menimbulkan rasa tanggung jawab kyai untuk menyediakan asrama bagi santri, dan tumbuh dalam diri santri sikap selalu taat kepada kyai (Anwar, 2016).

Keadaan asrama biasanya sangat sederhana, cukup untuk berteduh dan menaruh beberapa barang pribadi sehingga santri yang kaya pun harus puas dengan keadaan seperti itu. Beberapa dapur juga disediakan bagi santri yang memasak. Untuk tempat tinggal santri putri biasanya terpisah dari asrama putra dan keadaannya pun tidak jauh berbeda dengan asrama untuk santri putra.

### 3. Masjid (Mosco)

Kata masjid merupakan bentuk isim makan (keterangan tempat), berasal dari kata sajada yasjudu yang artinya tempat untuk bersujud atau tempat orang beribadah (Kamus Munjid fi al-luhgah wa al-I’lam, 1986). Secara harfiah masjid diartikan sebagai tempat duduk atau setiap tempat yang dipergunakan untuk beribadah. Masjid juga berarti tempat sholat berjamaah atau tempat sholat untuk umum (orang banyak). (Hasbullah., 1999). Masjid diartikan juga adalah tempat sujud

karena tempat ini setidak-tidaknya seorang muslim lima kali sehari semalam melaksanakan shalat. Fungsi masjid tidak saja hanya untuk shalat, tetapi juga mempunyai fungsi lain seperti pendidikan dan lain sebagainya. Di zaman Rasullullah masjid berfungsi sebagai tempat ibadah dan urusan-urusan kemasyarakatan serta pendidikan (Daulay, 2001).

Dengan perkataan lain masjid adalah yang didirikan oleh sekelompok muslim atau individu untuk memenuhi kebutuhan suatu lokasi atau kelompok tertentu. Tidak membutuhkan ijin dari pemerintah, perawatan masjid dan gaji guru dari waqaf dan sedekah. Masjid dapat menentukan guru serta arah kegiatannya ditentukan sendiri (Asari, 2007). Suatu pesantren mutlak mesti memiliki masjid, sebab disitulah akan dilangsungkan proses pendidikan dalam bentuk komunikasi belajar mengajar antara kyai dan santri. Masjid sebagai pusat pendidikan Islam telah berlangsung sejak masa Rasulullah, dilanjutkan oleh Khulafa al-Rasyidin, dinasti bani Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyah dan dinasti-dinasti lain. Tradisi itu tetap di pegang oleh para kyai pemimpin pesantren untuk menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan (Daulay, 2001).

### 4. Santri (Pelajar/ Siswa)

Pengertian santri lebih tertuju kepada pesantren dengan sistem pendidikan tradisional sedangkan pada pendidikan modern yang menganut sistem barat di sebut siswa. Namun dalam pendidikan sistem tradisional pesantren ada dua macam santri. Pertama, Santri Mukim yaitu santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren, dan mereka juga mempunyai tanggung Jawab mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari. Kedua, Santri Kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa di sekeliling

pesantren, yang biasanya tidak menetap di dalam pesantren. Untuk mengikuti kegiatan pesantren, mereka pulang pergi dari rumahnya sendiri. Keberadaan jumlah santri mukim dan santri kalong menjadi cerminan besar dan majunya sebuah pondok pesantren. Semakin besar jumlah santri mukim, maka semakin besar sebuah pesantren. Dan pesantren kecil jumlah santri kalongnya lebih banyak dari jumlah santri mukimnya (Anwar, 2016).

Ada beberapa alasan seorang santri pergi dan menetap di suatu pesantren diantara lain adalah (Dhofier, 1994):

a. Ia ingin mempelajari kitab-kitab lain yang membahas Islam secara mendalam dibawah bimbingan kyai yang memimpin pesantren tersebut.
b. Ia ingin memperoleh pengalaman kehidupan pesantren, baik dalam bidang pengajaran, keorganisasian maupun hubungan dengan pesantren-pesantren yang terkenal.
c. Ia ingin memusatkan studinya di pesantren tanpa disibukkan oleh kewajiban sehari-sehari di rumah keluarganya. Disamping itu dengan tinggal di sebuah pesantren yang sangat jauh letaknya dan rumahnya sendiri ia tidak mudah pulang balik meskipun kadang-kadang menginginkannya.

### 5. Pengajian Kitab-Kitab Islam

Klasik Kitab-kitab Islam klasik yang lebih popular dengan sebutan kitab kuning. Kitab–kitab ini ditulis oleh ulama -ulama Islam pada abad pertengahan. Kepintaran dan kemahiran seorang santri diukur dari kemampuannya membaca serta mensyarahkan (menjelaskan) isi kitab-kitab tersebut. Untuk tahu membaca sebuah kitab dengan benar, seorang santri dituntut untuk mahir dalam ilmu –

ilmu Bantu, seperti ilmu nahwu, syaraf, balaghah, ma'ani, bayan dan lain sebagainya (Dulay, 2001).

Kitab kuning pada umumnya dipahami sebagai kitab – kitab keagamaan berbahasa Arab, menggunakan aksara Arab, yang dihasilkan oleh para ulama dan pemikir muslim lainnya di masa lampau khususnya yang berasal dari timur Tengah. Kitab kuning mempunyai format yang khas, dan warna kertas "kekuning kuningan". Selain ulama dari timur Tengah dan ada juga kitab kuning ini di tulis oleh ulama Indonesia sendiri (Azra, 1999).

Pada jaman dahulu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, terutama karangan–karangan ulama yang menganut faham Syafi'iyah, merupakan satu–satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan utama pengajaran ini adalah untuk mendidik para calon ulama. Para santri yang tinggal di pesantren untuk jangka waktu pendek (misalnya kurang dari satu tahun) dan tidak bercita–cita menjadi ulama,mempunyai tujuan untuk mencari pengalaman dalam hal pendalaman perasaan keagamaan (Dhofier, 1994).

## C. KARAKTERISTIK PONDOK PESANTREN

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Keberadaan pondok pesantren beserta perangkatnya berperan sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan yang memberi corak tersendiri bagi masyarakat perdesaan. Tumbuh dan berkembangnya pesantren semenjak lama serta menyatu dengan masyarakatnya. Tidak mengherankan pesantren secara kultural lembaga ini bisa diterima oleh masyarakat dan memberi corak serta norma yang dibutuhkan oleh masyarakat.

H.A. Mukti Ali mengemukakan karakteristik pendidikan pondok pesantren sebagai berikut (Ali, 1981):

1. Adanya hubungan yang akrab antara murid (santri) dengan Kyai.
2. Tunduknya santri kepada Kyai
3. Hidupnya hemat dan sederhana benar-benar dilakukan dalam kehidupan pondok pesantren.
4. Semangat menolong diri sendiri amat terasa dan kentara di kalangan santri di pondok pesantren.
5. Jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pondok pesantren.
6. Pendidikan disiplin sangat ditekankan.
7. Berani untuk menderita mencapai sesuatu tujuan adalah merupakan salah satu pendidikan yang diperoleh santri dalam pondok pesantren.

Menurut Mujamil Qomar mengatakan fungsi pesantren pada awal berdirinya sampai dengan kurun sekarang telah mengalami perkembangan. Visi, posisi, dan persepsinya terhadap dunia luar telah berubah. Pada masa paling awal (masa Syaikh Maulana Malik Ibrahim) berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama islam. (Qomar, 2005). Selanjutnya Ma'shum mengatakan fungsi pesantren mencakup 3 aspek yaitu fungsi religious, sosial, dan edukasi. (Qomar, 2005). Beda halnya dengan pendapat Muljono Damopolii yang mengatakan terdapat lima fungsi pondok pesantren yaitu:

*Pertama*, fungsi sebagai lembaga pendidikan seperti diselanggarakannya pendidikan formal kesekolahan (SLTP/SMU) dan kepesantrenan.

*Kedua*, fungsi sebagai lembaga sosial yang ditujukan kepada masyarakat kampus pesantren itu sendiri, peserta didik, pembina maupun pengelolanya.

*Ketiga,* fungsi sebagai lembaga penyiar agama yang dicerminkan oleh keberadaan masjid di dalam kampus pesantren.

*Keempat,* fungsi sebagai reproduksi ulama yang dicerminkan oleh adanya lembaga kepesantrenan. Kelima, fungsi sebagai pelestari tradisi Islam yaitu adanya perhatian yang besar dari lembaga pesantren untuk menggarap bidang keagamaan (Damopolii, 2011).

## D. PERAN PESANTREN SEBAGAI WADAH MASA DEPAN BANGSA

Di Indonesia, aktivitas wisata diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. UU ini mengatur tentang kepariwisataan secara umum. Menurut UU ini, pariwisata adalah ‗berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 butir 3). Usaha pariwisata mencakup banyak sektor, antara lain jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, spa dan lain-lain (Pasal 14).

Kini, perkembangan dan pertumbuhan pariwisata, lebih khusus lagi pariwisata syariah, terus diminati dan menjadi sektor penting yang diikhtiarkan oleh berbagi negara di dunia. Di daerah tercinta kita, di NTB, pariwisata menjadi sektor andalan di masa pemerintahan Gubernut NTB TGB Zainul Majdi. Di masa ia menjadi gubernur pula, NTB menorehkan prestasi dan mendapat penghargaan dari presiden

dalam upaya pengembangan pariwisata syariah. Sejauh yang saya tahu, pada masa pemerintahan TGB di NTB itu bahkan pada tahun 2016 lalu, Indonesia meraih 12 dari 16 penghargaan di bidang pariwisata pada ajang World Halal Travel Awards di Unites Arab Emirates. Dan Lombok-NTB mendapatkan paling banyak penghargaan.

Di masa dua priode menjadi pemimpin di NTB, gubernur yang juga seorang ahli agama ini, mengembangkan sektor pariwisata. Di daerah tercinta kita ini namanya Bumi Gora (Bumi Gugur Ancah), Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah andalan Indonesia untuk pengembangan wisata halal dunia. Bahkan, daerah yang memiliki Gunung Rinjani dan Tambora ini dikenal jago dalam hal pengembangan muslim friendly tourism. Keberadaan masyarakat NTB yang notabene mayoritas beragama Islam menjadi modal untuk pengembangan pariwisata. Dari segi lokasi/destinasi wisata NTB juga menyuguhkan pulau-pulau yang mempesona, belum lagi destinasi pantai yang memukau. Wisata religi yang kental dengan budaya juga ada, tak terkecuali keberadaan kemegahan Islamic Center sebagai salah satu masijd terbesar di NTB. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, khususnya sirkuit Mandalika yang beberapa waktu lalu menjadi arena WSBK kian membuka peluang pengembangan pariwisata di NTB. Dampaknya, sangat positif bagi NTB. Pertumbuhan dan dan pengembangan pariwisata kian tumbuh, dampak positif terhadap aktivitas sosial ekonomi adalah sesuatu yang positif bagi daerah. Konon, Sayangnya, meski demikian banyak manfaat positifnya bagi NTB, tidak sedikit masyarakat masih memandang sebelah mata. Ini tentu tantangan. Namun secara umum peran pesantren sebagai wadah masa depan bangsa yaitu sebagai tempat

penjaga tradisi budaya, kiblat peradaban manusia, embrio cendikiawan yang beradab.

## E. PENANAMAN NILAI EKONOMI PADA SANTRI

Bicara soal nilai ekonomi pada santri ini cukup menarik dan sangat penting untuk kita bahas, karena santri bukan hanya di cetak untuk menjadi kiayai, guru dan marbot, akan tetapi santri harus mampu melawan tantangan zaman, lebih-lebih sekarang ini era digital dan serba cepat, manusia dipermudah berkomunikasi melalui plaform digital, dengan bebas di seluruh penjuru dunia atau dikenal dengan istilah "*Global Ekonomi''.*

Potensi ekonomi sangat besar dengan jumlah pesantren di Jawab Barat mencapai 4, 328 buah dengan jumlah santri lebih dari 5 juta orang merupakan raksasa kekuatan bila dikembangkan. Untuk itu pusat koperasi pesantren (puskopontren) Jabar dan Kanwil Kementrian Agama (Kemenag) Jabar menggelar magang usaha bagi 204 santri. Sebanyak 204 santri yang berasal dari 68 pesantren di Jawa Barat mengikuti pemagangan santri ponpes selama sebulan (Fitri 2014). Pemegangan untuk memberikan pelatihan berusaha sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki para santri dilatih mengelola pusat informasi bisnis perkulakan dan distribusi barang di sejumlah tempat.

Potensi dan peran pesantren sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai nilai yang cukup strategis dan signifikan dalam memberikan sumbangsih dan perannya bagi peningkatan keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pengembangan ekonomi umat, pesantren di samping berperan sebagai agent of social change, sekaligus sebagai pelopor kebanggkitan ekonomi umat. Hal ini, terlihat setidaknya bagi komunitas pesantren dan masyarakat sekitarnya, dengan dibentuknya kelompok

Wirausaha Bersama (KWUB) antar pesantren maupun antar pesantren dengan masyarakat, dan pembentukan forum komunikasi pengembangan ekonomi kerakyatan (FKPEK), meski diakui, keberadaan lembaga ini masih dalam tahap permulaan (Muttaqin 2016).

Kiprah pesantren dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, dapat dilihat dari partisipasi pesantren dalam memasyarakatkan koperasi. Di Indonesia, ide koperasi pertama kali disampaikan oleh Bung Hatta, dan mulai dikampanyekan secara luas pada tahun 1930-an. Saat itu tidak banyak masyarakat yang menyambut gagasan tersebut. Mereka tidak peduli karena masih berada dalam kondisi ekonomi yang lemah dan terjajah, di samping belum memahami dan mengetahui kelebihan-kelebihan koperasi.

Akan tetapi, dalam kondisi seperti itu, pesantren menyambut baik gagasan tersebut. Bahkan pesantren tercatat sebagai pihak yang pertama kali menyambut dan mengembangkan sektor koperasi. Pada awalnya tentu masih dijalankan dengan pengelolaan manajemen yang amat sederhana. Akan tetapi, lambat laun koperasi pondok pesantren berkembang perekonomian di lingkungan santri. Contoh konkretnya adalah koperasi pesantren di pekalongan, Jawa Tengah, yang ikut mendorong perkembangan perdagangan batik, sehingga sempat mengundang kekaguman Bung Hatta saat itu.

Dalam hubungannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, pondok pesantren juga telah berjasa dalam memelopori lahirnya Lembaga Tenaga Pengembangan Masyarakat (LTPM). Program ini pertama kali dibentuk pada tahun 1997 di pesantren pabelan, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1979 dengan program latihan pengenalan jenis-jenis Teknologi Tepat Guna (TTG)(Jamaluddin 2012).

Selain memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan masyarakat dalam arti fisik misalnya keterampilan pesantren juga berandil besar dalam penggalakan wirausaha. Di lingkungan pesantren, para santri di didik menjadi manusia yang bersikap mandiri dan berjiwa wirausaha. Mereka giat berusaha dan bekerja secara independen tanpa menggantungkan nasib pada orang lain atau lembaga pemerintah dan swasta. Para santri mau bekerja apa saja, asal halal. Tidak pernah terdengar, seorang santri kebingungan mencari lowongan pekerjaan dan terpaksa jadi penganggur.

Dengan anggapan dasar bahwa tidak semua lulusan atau keluaran pondok pesantren akan menjadi ulama atau kyai memilih lapangan pekerjaan di bidang agama, maka keahlian-keahlian lain seperti pendidikan keterampilan perlu diberikan kepada santri, sebelum santri itu terjun ke tengah-tengah masyarakat sebenarnya. Di pihak lain, guna menunjang suksesnya pembangunan diperlukan partisipasi semua pihak, termasuk pihak pondok pesantren sebagai suatu lembaga yang cukup berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren secara historis dan tradisi.

Pondok pesantren memang dituntut untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan kurikuler dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat sekitarnya, tentu saja hal tersebut tidak akan dapat berkembang dengan baik jika tidak didukung oleh dana dana tradisional, baik itu wakaf, bantuan insidental dari pihak wali santri, pemerintah, swasta dan masyarakat atau donatur yang lain. Untuk menanggulangi hal yang demikian inilah pentingnya keberadaan unit usaha dan pengembangan keterampilan di pondok pesantren yang diupayakan dalam menghasilkan dana untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pondok pesantren.

Perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki adanya pembinaan anak didik yang dilaksanakan secara seimbang antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat secara luas serta meningkatkan kesadaran terhadap alam lingkungannya. Pendidikan yang demikian itu diharapkan dapat merupakan upaya pembudayaan untuk mempersiapkan warga guna melakukan sesuatu pekerjaan yang menjadi mata pencahariannya dan berguna bagi masyarakat serta mampu menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Untuk memenuhi tuntutan pembinaan dan pengembangan bangsa yang demikian luas dan berat itu, kini pemerintah dan masyarakat berusaha mengerahkan segala sumber dan kemungkinan yang ada agar pendidikan secara keseluruhan mampu mengatasi berbagai problem yang dihadapi masyarakat dan bangsa.

Dalam upaya mengerahkan segala sumber yang ada dalam bidang pendidikan untuk memecahkan berbagai masalah tersebut, maka eksistensi pondok pesantren akan lebih disorot. Karena masyarakat dan pemerintah mengharapkan pondok pesantren yang memiliki potensi besar dalam bidang pendidikan, keagamaan dan sosial itu dapat ditingkatkan partisipasinya secara lebih aktif lagi dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Pesantren pada realitasnya telah mampu menjadi suatu lembaga yang ampuh untuk melegitimasi otoritas dan kekuasaan kiai. Dengan pesantren itu pula kiai mampu membangun dan mengembangkan jaringan dengan masyarakat luar.

## F. MACAM-MACAM POTENSI EKONOMI PESANTREN

Potensi pesantren dalam menggerakkan ekonomi syari'ah ada tiga (Yakin 2014):

*Pertama* ialah sebagai agen perubahan social di bidang ekonomi syariah di tengah arus globalisasi di seluruh dimensi kehidupan manusia, himpitan dan tekanan ekonomi menjadi salah satu akar penyebab terjadinya disorientasi manusia Muslim. Lingkungan yang kian kapitalistik, materialistik dan hedonis seolah memberikan legitimitasi untuk bersikap permisif terhadap segala sesuatu meskipun mendistorsi ajaran agama. Pranata sosial seolah tercerabut oleh kepentingan-kepentingan ekonomi jangka pendek.

Kondisi semacam ini pada dasarnya membuat manusia modern menjadi 'lelah", dan kehilangan referensi karena tuntutan ekonomi. Aktifita ekonomi yang pada dasarnya untuk memenuhi hajat manusia, justru bergeser menjadi aktivitas untuk mengejar dan memuaskan selera dan bahkan keinginan (satisfying wants). Namun karena nafsu dan keinginan tak pernah mengenal batas, maka manusia pun tak pernah berhenti untuk mengejarnya.

Merujuk pada kondisi inilah, pesantren pada posisi ini untuk melakuan perubahan sosial. Mengubah orientasi ekonomi masyarakat yang semula bertujuan untuk memuaskan keinginan, menjadi "cukup" dengan memenuhi kebutuhan.

Mengubah gaya hidup yang konsumeris, menjadi pola hidup yang moderat membingkai aktifitas ekonomi modern dalam kerangka ta'abbudi (ibadah) yang semula hanya sebatas dalam bingkai memuaskan kebutuhan jasmani. Mengubah orientasi profit-orienteddan *utility*, menjadi orientasi "maximizing*"* maslahah.

*''Kedua''* peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Halini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan dai yang legitimed di

masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syariah. Disamping itu mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengar daripada ulama dan dai produk lembaga non pesantren. Kelebihan lainnya mereka lebih menguasai fiqh muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi syari'ah kepada masyarakat dengan lebih baik.

Pada sisi yang lain, pesantren juga dituntut kemandiriannya dari sisi ekonomi dan finansial. Dependensi pesantren secara finansial kepada pihak luar baik yang berupa kekuatan politik, birokrasi maupun kekuatan yang lain akan menggerus kemandirian pesantren. Pesantren akan lebih mudah terkooptasi dengan kepentingan tertentu jika menggantungkan kemampuan finansialnya kepada pihak lain.Oleh karenanya menjadi penting bagi pesantren untuk mempunyai unit usaha dan bisnis yang dapat menjadi sumber pemasukan bagi pesantren. Pada posisi ini, tentu unit bisnis syariah yang terbebas dari MAHGRIB (maysir, gharar, riba, risywah dan bathil) harus menjadi pilihan utama kalangan pesantren.

Selain itu, pesantren juga berperan sebagai lembaga produksi dan konsumsi. Pesantren sebagai lembaga produksi yang di tunjukkan dengan adanya penguasaan terhadap tanah yang luas, memiliki tenaga kerja dan teknologi yang sangat diperlukan untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan, menunjukan bahwa pesantren merupakan salah satu produsen. Jika sebuah pesantren bergerak dalam bidang pertanian, maka pesantren ini merupakan produsen dalam bidang pertanian, jika pesantren bergerak dalam bidang industri

(kerajinan, kecil) maka pesantren sebagai produsen dalam bidang industri.

Agar dapat melanjutkan eksistensinya dalam dunia usaha, maka pesantren harus berinovasi dalam pengembangan produknya. Jika hanya mengandalkan pasar tradisional yang dimiliki maka perkembangannya akan cenderung stagnan. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengefisienkan faktor produksi yang dimiliki yang kemudian mengembangkan diversifikasi produk dan tenaga kerja. Dengan demikian akan memunculkan efisiensi ekonomi. Sedangkan efisiensi ekonomi mengacu pada nilai output terhadap input, atau nilai sumberdaya (faktor produksi) yang dipakai menghasilkan output tersebut. Pengukuran efisiensi ekonomis mensyaratkan nilai-nilai ditempatkan pada komoditi. Dalam analisis kesejahteraan, nilai yang ditempatkan (sebagai satuan hitung atau pengukur) pada komoditi itu adalah nilai-nilai yang diberikan oleh pasar sempurna. Ekonomi Italia, Dilfredo Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumberdaya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi pareto (pareto condition). Definisi kondisi pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut tidak akan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi dimana sebagian atau semua pihak/individu takkan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela. Inilah peranan ekonomi pesantren sebagai produsen, lebih lanjut kami mengestimasi peranan pesantren dalam menyediakan *output* barang produksi.

Pada sisi lain, dunia pesantren juga membutuhkan optimalisasi pendidikan mereka di bidang ekonomi syariah. Hal ini perlu dilakukan agar pendidikan pesantren tetap eksis, up-to-date,dan mempunyai

kekuatan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pesantren perlu mengembangkan sistem pendidikannya, termasuk metodologi pengajaran dan muatan kurikulum, salah satunya dengan mengakomodasi muatan fiqih muamalah ashriyyah yang lebih mengarah pada aktivitas ekonomi kontemporer (Hakim 2014).

Pondok pesantren (Ponpes) dalam bacaan teknis merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para santri. Pernyataan ini menunjukkan makna pentingnya ciri-ciri ponpes sebagai sebuah lingkungan pendidikan integral. Sistem pendidikan ponpes sebetulnya sama dengan sistem yang dipergunakan Akademi Militer, yakni dicirikan dengan adanya sebuah bangunan beranda yang di situ seseorang dapat mengambil pengalaman secara integral (Gamal Abdul Nasir Zakaria 2010).

Dibandingkan dengan lingkungan pendidikan parsial yang ditawarkan sistem pendidikan sekolah umum di indonesia sekarang ini, sebagai budaya pendidikan nasional, ponpes mempunyai kultur yang unik. Karena keunikannya, ponpes digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Lima ribu lebih ponpes yang tersebar di enam puluh delapan ribu desa, merupakan bukti tersendiri untuk menyatakannya sebagai sebuah subkultur. Keunikan ini pula pada gilirannya dapat menghasilkan nilai ekonomis yang sangat besar bila dikelola secara potensial.

Di samping itu, ketika kita berbicara tentang ponpes, sama sekali tidak bisa dilepaskan dari figur kiai-ulama yang memimpin ponpes tersebut. Sebab kepemimpinan kiai-ulama di ponpes adalah sangat unik, di mana mereka memakai sistem para-modern, yaitu relasi sosial antara kiai-ulama-santri dibangun atas landasan kepercayaan, sebagaimana dilakukan masyarakat umumnya. Ketaatan santri kepada kiai-ulama lebih dikarenakan mengharapkan barokah (grace), sebagaimana di pahami dari konsep sufi.

Karena itulah, salah satu daya tarik sebuah ponpes antara lain ditentukan oleh figur dan kharisma sang kiai-ulama pengasuhnya. Namun demikian disadari, bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan kiai-ulama-santri sehingga mengarah pada pola patron-klien dengan memposisikan kiai-ulama sebagai ''ibu ponpes'' yang memperoleh keuntungan dari *a province wide,* dan mendapatkan pengaruh dalam sektor ekonomi dan kepemimpinan politik (Haningsih 2008).

Dalam kehidupan masyarakat terdapat terdapat pula sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat bertanggung jawab untuk melestarikan atau memperbaiki nilai-nilai yang ada karena itulah kehidupan dan sistem nilai di masyarakat harus terintegrasi dalam kurikulum.

Dengan demikian kebudayaan dan pendidikan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan karena saling mengikat. Kebudayaan itu hidup dan berkembang karena proses pendidikan, sedangkan pendidikan itu sendiri hanya dalam konteks kebudayaan. Dalam arti tertentu, kurikulum adalah rekayasa dari pembudayaan suatu masyarakat, sedangkan proses pendidikan itu pada hakikatnya merupakan proses pembudayaan yang dinamis.

Sumber daya Sementara dalam pengembangan pendidikan khususnya madrasah dan pesantren, memerlukan penanganan yang holistil (menyeluruh), ini artinya bahwa pendidikan madrasah dan pesantren memiliki tanggung jawab sebagai sekolah umum berciri khas Islam agar mampu meningkatkan kualitas manusia. Karena menurut Wardiman Joyonegoro dalam Dudhijanto, manusia yang berkualitas itu setidak-tidaknya mempunyai dua kompentensi, yaitu kometensi bidang IMTAQ (iman dan taqwa) dan IPTEK (Budhijanto 2017).

Untuk itu diperlukan beberapa kemampuan sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat sekarang: (a). Kemampuan untuk mengetahui pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan. (b). Kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan yang sedang terjadi. (c). Kemampuan untuk menyusun program penyesuaian diri yang akan ditempuh dalam waktu tertentu.

## G. MODEL-MODEL PERKEMBANGAN EKONOMI PONDOK PESANTREN

Belajar daro Ponpes Ar-Raisyidah(Yakin 2014) yang telah sukses dalam pemberdayaan ekonomi Ponddoknya, berawal dari pemikiran para pengurus pondok pesantren (Ponpes) tentang upaya meningkatkan pesan dan fungsi ponpes dalam berdakwah sekaligus membantu kesejahteraan para ustadz dan santri. Dari situ, awal tahun 1961 dibentuklah wadah penghimpunan impanan dari para ustadz. Wadah ini kemudian disepakati berbentuk koperasi yang anggotanya terdiri dari para ustadz pondok. Bentuk simpanan yang semula dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan (simpan pinjam) para ustadz ini kemudian dalam perkembangannya menjadi modal usaha para ustadz tersebut.

Pada awal berdirinya, koperasi tersebut belum terkait secara langsung, baik secara kelembagaan maupun pemodalan dengan ponpes. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya kegiatan koperasi, dengan memperbaiki sistem keorganisasian sejalan dengan dukungan anggota dan ponpes, maka disepakati seluruh simpanan anggota koperasi kekayaan ponpes. Saat itulah laba koperasi (SHU) digunakan untuk kemaslahatan ponpes.

Selanjutnya, masih dalam tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 4 september 1997 berdiri pula koperasi Baitul Mal wat Tamwil (disingkat BMT) dengan menerapkan simpan pinjam pola syaraiah. BMT menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil) atau *murabahah* (jual beli).

Hal ini dapat dimaklumi mengingat usaha ini merambah hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama dimaksudkan untuk mengikis habis para rentenir yang keberadaannya sangat meresahkan dan mencekik perekonomian masyarakat. Pengembangan ekonomi pesantren dihadapkan pada upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kegiatan usaha bersama. Hal ini sesungguhnya telah menjadi karakteristik pesantren yang selalu mampu mandiri dan swadaya dalam kegiatan dakwah islam di masyarakat.

Terkait dengan penguat dan pengembangan kelembagaan ekonomi di pondok pesantren, maka patut kita telaah sejauh mana peran pondok pesantren dalam upaya, meningkatkan taraf (perekonomian) warga sekitar sebagai bagian dari perang melawan kemiskinan (jihad) karena kaum muslimin di indonesia sampai sekarang masih terpinggirkan.

Program penguatan dan pengembangan potensi ekonomi pesantren pada dasarnya merupakan replikasi atau penalaran keberhasilan suatu pesantren dalam mengembangkan kegiatan ekonomi kepada pesantren lain yang memiliki potensi ekonomi, SDM dan dukungan pimpinan pesantren yang tinggi. Pendampingan dimulai dari kegiatan orientasi berbasis praktek, pemberian dana pengembangan ekonomi, dan proses penularan atau replikasi serta

bantuan supervisi. Dengan adanya program, penguatan dan pengembangan potensi ekonomi pesantren ini menjadi bekal bagi pesantren untuk dapat lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing pondok pesantren.

Perlu adanya pengembangan ekonomi lebih lanjut melalui program lanjutan tentang penguatan dan pengembangan potensi ekonomi pesantren, sehingga mampu menyempurnakan program ini. Pesantren agar menjadi sebuah lembaga yang banyak diminati masyarakat yang di dalamnya tidak hanya kegiatan yang bersifat rohani, tetapi perlu terus dikembangkan dan dibina dalam penguatan potensi ekonomi pondok pesantren.

# Bab 5 Peranan Wirausaha dan Etika Bisnis

## A. PENGERTIAN ETIKA BISNIS

Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") menurut Wahyu dan Ostaria (2006) adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Menurut Bekum (2004) etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.

Dari hasil analisis Bertens (2004: 6) disimpulkan bahwa etika memiliki tiga posisi, yaitu sebagai (1) sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, (2) kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral, dan (3) filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk. Dalam poin ini, akan ditemukan keterkaitan antara etika sebagai sistem filsafat sekaligus artikulasi kebudayaan. Di samping itu, filsafat menganalisa tentang mengapa dan bagaimana manusia itu hidup di dunia serta mengatur level mikrokosmos (antar manusia/Jagad Cilik) dan makrokosmos (antar Alam dan Tuhan/Jagad Gede). Sebagai sistem pemikiran tentunya konsep dasar filsafat digunakan dalam mengkaji etika dalam sebuah

hubungan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Hubungan tersebut didasari landasan pemikiran bahwasanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan kita setiap hari.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2009), bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Skinner (1992) mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.

Menurut Anoraga dan Soegiastuti (1996), bisnis memiliki makna dasar sebagai *"the buying and selling of goods and services"* Adapun dalam pandangan Atraub dan Attner (1994), bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat dilihat dengan indra), sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis (Yusanto dan Widjayakusuma, 2002.

Bisnis adalah suatu aktivitas yang mengarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dalam terminologi bahasan ini, pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan den industri guna memaksimalkan nilai keuntungan. Menurut Anoraga dan Soegiastuti (1996) mendefinisikan bisnis sebagai aktivitas jual beli barang dan jasa. Straub dan Attner (1994) mendefinisikan bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan

penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (Muhammad, 2005).

## B. PENGERTIAN BISNIS

Menurut Griffin dan Ebert (2008: 4) bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba. Menurut Sukirno (2010: 20) bisnis adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Semua orang atau individu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis pastinya untuk mencari keuntungan agar kebutuhan hidup nya terpenuhi. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian.

Menurut Madura (2010: 2) bisnis adalah suatu badan yang diciptakan untuk menghasilkan produk barang dan jasa kepada pelanggan. Setiap bisnis mengadakan transaksi dengan orang-orang. Orang-orang itu menanggung akibat karena bisnis tersebut, mereka. Kerja sama lintas fungsional di dalam bisnis adalah dengan menekankan kebutuhan para manajer dari area fungsional yang berbeda untuk memaksimalkan laba dalam mencapai tujuan Bersama.

Dari pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada yang dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang atau jasa guna mendapatkan laba / keuntungan yang sebesar-besarnya.

## C. PERAN ETIKA BISNIS

Etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk mengontrol dan memeriksa pengaturan moral dan etika perusahaan. Ia juga mendalami seberapa baik atau buruk badan usaha membahas

masalah-masalah moral dan etika dan menunjukkan apa yang salah dalam proses alami mereka. Ini mencakup semua aspek bisnis dari produksi untuk administrasi, keuangan dan pemasaran. Hal ini juga berlaku untuk berbagai industri dan dapat deskriptif atau normatif dalam disiplin.

Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, dimana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Menurut Richard De George, bila perusahaan ingin sukses/berhasil memerlukan 3 hal pokok yaitu:

a) Memiliki produk yang baik
b) Memiliki managemen yang baik
c) Memiliki Etika

Tiga aspek pokok dari bisnis yaitu: dari sudut pandang ekonomi, hukum dan etika dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sudut Pandang Ekonomis

Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang terjadi disini adalah adanya interaksi antara produsen/perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan antar manusia ini adalah bertujuan untuk mencari untung oleh karena itu menjadi kegiatan ekonomis. Pencarian

keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi dilakukan melalui interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Dari sudut pandang ekonomis, good business adalah bisnis yang bukan saja menguntungkan, tetapi juga bisnis yang berkualitas etis.

2) Sudut Pandang Etika Dalam bisnis, berorientasi pada profit, adalah sangat wajar, akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Tidak semua yang bisa kita lakukan boleh1 dilakukan juga. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Pantas diperhatikan, bahwa dengan itu kita sendiri tidak dirugikan, karena menghormati kepentingan dan hak orang lain itu juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri.

3) Sudut Pandang Hukum

Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dan dalam praktek hukum banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis, pada taraf nasional maupun international. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti daripada etika, karena peraturan hukum dituliskan hitam atas putih dan ada sanksi tertentu bila terjadi pelanggaran.

## D. FUNGSI DAN ETIKA BISNIS TERHADAP PERUSAHAAN

Setelah mengetahui betapa pentingnya etika yang harus diterapkan pada perusahaan bisnis, tentunya etika memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri. Permasalahan etika bisnis yang terjadi di perusahaan bervariasi antara

fungsi perusahaan yang satu dan fungsi perusahaan lainnya. Hal ini terjadi karena operasi perusahaan sangat terspesialisasi dalam berbagai bidang profesi, sehingga setiap fungsi perusahaan cenderung memiliki masalah etika tersendiri. Berikut ini akan dibahas berbagai permasalahan etika bisnis yang terjadi di beberapa bidang fungsi perusahaan, yaitu: etika bisnis di bidang akuntansi (*accounting ethics*), keuangan (*finance ethics*), produksi dan pemasaran (*production and* marketing *ethics*), sumber daya manusia (*human resources ethics*), dan teknologi informasi (*information technology ethics*) yang dapat dijelaskan sebagai beriku:

a) Etika Bisnis di Bidang Akuntansi (*Accounting Ethics*)

Fungsi akuntansi merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan demikian kejujuran, integritas, dan akurasi dalam melakukan kegiatan akuntansi merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan oleh fungsi akuntansi. Salah satu praktik akuntansi yang dianggap tidak etis misalnya penyusunan laporan keuangan yang berbeda untuk berbagai pihak yang berbeda dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penyusunan laporan keuangan seperti itu. Dalam realita kegiatan bisnis sering kali ditemukan perusahaan yang menyusun laporan keuangan yang berbeda untuk pihak-pihak yang berbeda. Ada laporan keuangan internal perusahaan, laporan keuangan untuk bank, dan laporan keuangan untuk kantor pajak. Dengan melakukan praktik ini, bagian akuntansi perusahaan secara sengaja memanipulasi data dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penyusunan laporan palsu tersebut.

b) Etika Bisnis di Bidang Keuangan *(Financial Ethics)*

Skandal keuangan yang berasal dari pelaksanaan fungsi keuangan yang dijalankan secara tidak etis telah menimbulkan

berbagai kerugian bagi para investor. Pelanggaran etika bisnis dalam bidang keuangan dapat terjadi misalnya melalui praktik window dressing terhadap laporan keuangan perusahaan yang akan mengajukan pinjaman ke bank. Melalui praktik ini seolah-olah perusahaan memiliki rasio-rasio keuangan yang sehat sehingga layak untuk mendapatkan kredit. Padahal sebenarnya kondisi keuangan keuangan perusahaan tidak sesehat seperti yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah dipercantik. Contoh lain pelanggaran etika keuangan misalnya melalui penggelembungan nilai agunan perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperoleh kredit melebihi nilai agunan kredit yang sesungguhnya.

c) Etika Bisnis di Bidang Produksi dan Pemasaran (*Production and Marketing Ethics*)

Hubungan yang dilakukan perusahaan dengan para pelanggannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Untuk melindungi konsumen dari perlakuan yang tidak etis yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dijelaskan berbagai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Antara lain, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

(1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

(3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
(4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

d) Etika Bisnis di Bidang Teknologi Informasi (*Information Technology Ethics*)

Salah satu area yang memiliki pertumbuhan masalah etika bisnis paling besar di era 1990-an sampai awal tahun 2000 adalah bidang teknologi informasi. Hal-hal yang dapat memunculkan permasalahan etika dalam bidang ini meliputi: serangan terhadap wilayah privasi seseorang, pengumpulan, penyimpanan, dan akses terhadap informasi usaha terutama melalui transaksi e-commerce, perlindungan hak cipta yang menyangkut pembuatan software, musik, dan hak kekayaan intelektual.

## E. SANKSI PELANGGARAN YANG AKAN DITERIMA JIKA PERUSAHAAN TIDAK MENERAPKAN ETIKA DIDALAM BISNISNYA

Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan, yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 yang berbunyi “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Pasal ini menjelaskan tentang Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Dan unsur dari bersekongkol itu sendiri adalah kerjasama antara dua pihak atau

lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu, pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. Hal diatas adalah pelanggaran yang akan diterima kepada perusahaan yang tidak menerapkan etika didalam bisnisnya karena memiliki unsur kecurangan. Hal lain yang menjadikan pelanggaran terhadap perusahaan yang tidak menerapkan etika didalam bisnisnya adalah pegawai perusahaan yang melakukan pelanggaran Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code* of *Conduct*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengenaan sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Komisaris dan Direksi, berpedoman pada anggaran dasar perusahaan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai perusahaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam Peraturan Disiplin Pegawai (PDP) maupun aturan kepegawaian yang berlaku. Pelaporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tanpa disertai dengan bukti-bukti pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari contoh pelanggaran diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadikan perusahaan untuk menerapkan etika di dalam bisnisnya bukanlah dari perusahaan itu sendiri melainkan adanya kejujuran dari para pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang

damai serta menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang menerapkan etika didalam bisnisnya.

## F. ETIKA BISNIS DI INDONESIA

Di Indonesia, etika bisnis merupakan sesuatu yang lama tetapi sekaligus baru. Sebagai sesuatu yang bukan baru, etika bisnis eksis bersamaan dengan hadirnya bisnis dalam masyarakat Indonesia, artinya usia etika bisnis sama dengan usia bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Dalam memproduksi sesuatu kemudian memasarkannya, masyarakat Indonesia tempo dulu juga telah berpatok pada pertimbangan-pertimbangan untung dan rugi. Namun dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang cinta damai, maka masyarakat Indonesia termotivasi untuk menghindari konflik-konflik kepentingan termasuk dalam dunia bisnis.

Secara normatif, etika bisnis di Indonesia baru mulai diberi tempat khusus semenjak diberlakukannya UUD 1945, khususnya pasal 33. Satu hal yang relevan dari pasal 33 UUD 45 ini adalah pesan moral dan amanat etis bahwa pembangunan ekonomi negara RI semata-mata demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang merupakan subyek atau pemilik negeri ini. Jadi pembangunan ekonomi Indonesia sama sekali tidak diperuntukkan bagi segelintir orang untuk memperkaya diri atau untuk kelompok orang tertentu saja yang kebetulan tengah berposisi strategis melainkan demi seluruh rakyat Indonesia. Dua hal penting yang menjadi hambatan bagi perkembangan etika bisnis di Indonesia adalah budaya masyarakat Indonesia dan kondisi social politik di Indonesia.

# DAFTAR PUSTAKA

Acs, Z & Autio. E, *The Global Entrepreneurship and Development Index: A Brief Explanation*. (Online), (http://www.imperial.ac.uk/tanaka/executive-education) diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ahmadi, Abu & Tri Prasetya, Joko. 1997. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: CV Setia.

Ali, Muhammad. 1993. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Modern. Jakarta: Pustaka Amani.

Alwi, Dahlan. 1978. *osialisasi Pola Hidup Sederhana.* terbit di Majalah *Prisma,* Edisi November.

Anoraga, Pandji. Janti, Sugiastuti. 1996. Pengantar Bisnis Modern, Kajian Dasar Manajemen Perusahaan. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

Anwar, Abu. 2016. Karakteristik Pendidikan dan Unsur-Unsur Kelembagaan di Pesantren. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, *2*(2).

Arfiah, S., & Prasetya, A. 2017. Pembelajaran Kepramukaan dalam Penguatan Karakter Kemandirian dan Tanggung Jawab dalam Upaya Mempersiapkan Mahasiswa PPKN Sebagai Pembina Ekstrakurikuler di Sekolah. *Urecol*, *4*(2).

Arifin, Zainal. 2012. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Astuti, Yuhana & Anggraini, Annisa. 2015. Modal Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Pada Sentra Kejinan Sepatu Cipaduyut Bandung. *Jurnal Manajemen Indonesia, 15*(2)

B.F. Skinner. 1938. The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis.Cambridge, Massachusetts: B.F. Skinner Foundation.

Badan Pusat Statistik. 2017. Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2017. (Online), (https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170505101853.pdf).

Barnadib, Imam Sutari. 1993. *Pengantar ilmu Pendidikan sistematis* Yogyakarta: Andi Ofset.

Bekum, Rafik ISSA, 2004. Etika Bisnis Islami (Terjemahan Muhammad). Yokyakarta: Pustaka Belajar.

Bertens, K. 2004. *Etika*. Gramedia. Jakarta.

Binti Maunah. 2009. Pesantren in The Perspective Social Change. *Jurnal Usuluddin, 30*, 251–82.

Budhijanto, Danrivanto. 2017. Teori Hukum Konvergensi di Abad Revolusi Digital.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka.

Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3S.

Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.

Djaelani, H.A. Timur. 1983. *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. Editor Abd. Rahman Shaleh, Jakarta: Dermaga.

Fitri, Sonia. 2014. Mengapa Harus Pilih Pendidikan Pesantren? (Online), (http://ditpdpontren.kemenag.go.id/berita/mengapa-harus-pilih-pendidikan-pesantren-ini-jawabannya/).

Gamal, Abdul Nasir Zakaria. 2010. Pondok Pesantren: Changes and Its Future. *Journal of Islamaic and Arabic Education,* 2(2), 45–52.

Gredler, Margareth E. Bell. 1991. *Belajar dan Membelajarkan*: *Terjemahan* Munandir. Jakarta: Rajawali Press.

Griffin, Ricky W dan Ebert, Ronald J. 2008. Bisnis 8 jilid 1. Erlangga. Jakarta. Madura Jeff, 2001. Pengantar Bisnis. Edisi Pertama.

Gunara, Thorik, dkk. 2002. *Marketing Muhammad; Strategi Andal dan Jitu PrahtihBisnis Nabi Muhammad SAW.* Bandung: Pustaka Semesta.

Haedari, Amir dkk. 2004. *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplesitas Global*. Jakarta: IRP Press.

Haedari, H. M. Amin, dkk. 2004. *Masa Depan Pesantren*. Jakarta: IRD Press.

Haedari, H. M. Amin. 2004. *Masa Depan Pesantren*. Jakarta: IRD Press.

Haider Naqvi, Syed Nawab. 1997. *Rodney Wilson, Economics, Ethics and Religion:Jewish, Christian and Muslim Economic Thought.* New York: New York University Press.

Hakim, Dhikrul. 2014. Implementasi Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Di Sekolah. *Religi: Jurnal Studi Islam*, *5*(1) 114–26.

Haningsih, S. 2008. Peran Strategis Pesantren, Madrasah Dan Sekolah Islam Di Indonesia. *El-Tarbawi*, (1), 27–39. http://www.jurnal.uii.ac.id/index.php/ Tarbawi/article/view/186.

Harjanto. 2003. *Perencanaan Pengajaran.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Iggi Haruman Achsien. 1999. *Menuju Kapitalisme Religius*? dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.

Indra Jati, Sidi. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Pradikma Pendidikan.* Jakarta: Logos.

Ismail. 2009. *Etos Bisnis Tiada Merugi; Peta Jalan jadi Pengusaha Sukses dan Kaya.* Jakarta: Khalifa.

Jamaluddin, Muhammad. 2012. Metamorfosis Pesantren Di Era Globalisasi. *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*. doi: 10.19105/karsa.v20i1.57.

Jamrah, Syaiful Bahri dan Zain, Aswan. 1996. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kholil, Mohamad. 2011. Menggagas Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim di Indonesia. *Media Akademika, 26*(3).

Ma'mur Asmani, Jamal. 2009. *Membaca Rezeki Orang*. Jogyakarta: Diva Press.

Mansyur. 1991. *Strategi Belajar Mengajar* Jakarta: Universitas Terbuka.

Marimba, Ahmad D. 1962. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam.* Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Maroelak Sihombing. 1980. *Partisipasi sebagai Pemerdekaan Manusia, Prisma 11 Nopember 1980.*

Mashur, *Hardiknas, Politik dan Pendidikan*ǁ. Suara NTB, tanggal 2/5 tahun 2014.

Mashur. 2009. *Menebar Ketulusan; Menyemai Benih Kebaikan dalam Tantangan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.* Penerbit: Guepedia.

Mashur. 2014. *Implementasi Nilai Ekonomi Islam pada Pedagang Asongan di Kawasan Pariwisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat.* Tesis. S2 Pascasarjana Universitas Mataram

Muhaimin dkk. 1996. *Strategi belajar mengajar (Penerapannya dalam Mengajar Pendidikan agama)* Surabaya: Citra Media.

Musa, Asy'ari. 2002. *Dialektika Agama untuk Pembebasan Spritual*, Yogyakarta: Lesfi.

Muttaqin, Rizal. 2016. Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren" (Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap Kemandirian Eknomi Santri Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 1*(2).

Narbuko, Cholid., & Achamadi Abu. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nata, Abudin. 1997. *Filsafat Pendidikan islam* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Ni'am, M. Asrorun. 2006. *Membangun Profesionalitas Guru.* Jakarta: eLSAS.

Partanto, Pius A dan Al Barry, M. Dahlan. 2001. *Kamus Ilmiah Poluler*. Surabaya: Arloka.

Rahardjo, Dawam. *Prisma. 10 Nopember 1978*

Raharjo, M. Dawam. 1994. *Pesantren dan Pembaharuan.* Jakarta: LP3ES.

Ramayulis. 1998. *Ilmu Pendidikan islam,* Jakarta: Kalam Mulia.

Rizqa, Hasanul. 2020. *Allah Melaknat Pemberi dan Penerima Suap*. (Online), (https://www.republika.co.id/berita/q9lr77458/allah-melaknat-pemberi-dan-penerima-suap) diakses pada hari Senin, 7 November 2022.

Rofik, Ainur. 2012. *Pembaruan Pesantren (Respon terhadap Tuntutan Transformasi Global)*. STAIN: Jember Press.

Rohmad, H. 2015. *Pengantar Statistika*. Yogyakarta: Kalimedia.

Rumijati Aniek. 2010. Pengaruh Bakat Potensi Kewirausahaan dan Metode Pembelajaran terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa. *Ekonomika Bisnis*, *1*(2).

Rusdiana. 2014. *Kewirausahaan Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Pustaka.

Salemba Empat, Jakarta. Muhammad Abdul Ghani, 2005. The Sprituality in Business, PENA. Jakarta.

Saputro, Supriadi dkk. 2000. *Staretgi pembelajar, bahan sajian program Pendidikan mengajar*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Satori Dja'man, Komariah Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Straub, J.T. & Attner, R.K. 1994. Introduction to Business. California: Wadworth Publishing Company.

Sugiarto, Eddy Cahyono. 2013, Gerakan Kewirausahaan Nasional Untuk Menyebar Virus Wirausaha, (Online) (http://setkab.go.id/artikel-7434-gerakan-kewirausahaan-nasional-untuk-menyebar-virus-wirausaha.html) diakses 15 November 2018.

Suherman, Eman. 2010. Desain Pembelajaran Kewirausahaan, Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2010. Makroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grasindo Perseda.

Suriadiata, Irpan., Muhammad Syamsusabri., & Nurmaningsih. 2021. *Pendidikan Pancasila: Modul Berbasis Penanaman Nilai Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.

Wahyu, Y. Istiyono dan Ostaria Silaban. 2006. Kamus Pintar Bahasa Indonesia. Batam: Kharisma Publishing Group

Wiryosukarto, Amir Hamzah, et al. 1996. *Biografi KH. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis Pesantren Modern*. Ponorogo: Gontor Press.

Yakin, Nurul. 2014. "Studi Kasus Pola Manajemen Pondok Pesantren Al-Raisiyah di Kota Mataram." *Ulma Jurnal Studi Keislaman,* 18 (4), 199–220.

Yakub Muhammad, Mashur, Yusuf tantowi. "*Menangkap Perubahan disekitar Kita* "Sabtu 3 Desember 2022.

Yakub, Muhammad. 2019. Strategi Pemberdayaan Masyarkat Kreatif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Pelaku Usaha Kain Sesek. Tesis.

Yusanto M.I & M.K. Widjajakusuma. 2002. Menggagas Bisnis Islami Jakarta: Gema Insani.

Yusutria, Y., & Febriana, R. 2019. *Aktualisasi Nilai-Nilai Kemandirian Dalam Membentuk Karakter Mandiri Siswa*. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, *8*(1). https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i1.4575.

Zaini, Hisyam. dkk. 2002. *Desain Pembelajran di Perguruan Tinggi,* Yogyakarta: CTDS IAIN Sunan Kligaja.

Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial.* Jakarta: P3M.

# BIOGRAFI PENULIS I

**M. Yakub, S.HI., M.E** lahir dari kalangan keluarga petani di Dusun Lender Desa Kabul Lombok Tengah 31 Agustus 1991 Kontak Persona WA. 0878 6512 5935, Facebook; Yakub Ma'arif, Instagram: yakubputra, E-mail: yakubputrapratama@gmail.com, anak pertama dari pasangan Ismail dan Jumani dibesarkan di daerah transmigrasi tepatnya di Labangka Desa Suka Mulya tahun 1991 M. Adapun Riwayat Pendidikan yang pernah di selsaikan adalah SDN 1 Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab. Sumbawa (2004), Madrasyah Tsanawiyah (MTs) Al-Hidayah Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab. Sumbawa (2007), kemudian Madrasyah Aliah (MA) di Pondok Pesantren Manhalul Ma'arif Desa Darek Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah (2010).

Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang pernah diselsaikan S1 Hukum Islam (Muamalah) di IAIN Mataram 2010 s/d 2014, kemudian melanjutkan jenjang S2 Prodi Ekonomi Syariah Pasaca Sarjana di UIN Mataram 2017 s/d 2019, penulis juga pengabdi sebagai tenaga pengajar (Dosen) dari tahun 2019 di Fakultas Ekonomi Kampus Peradaban Bangsa Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Mataram Nusa Tenggara Barat sampai sekarang.

Penulis juga mempunyai karya buku dengan judul ''**Menangkap Perubahan di Sekitar Kita**'' Diterbitkan oleh Harfa Creative bulan Maret 2022. Kemudian menjadi penulis kedua di jurnal Nasional Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, dengan tema: ''**Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)**'' Juni 2022, Vol. 14, No. 1 di tahun 2022. Dan di

jurnal Nasional: IJERT: Indonesian Journal of Education Research and Technology ''**Strategi Pengembangan Desa Wisata Sebagai Pembangkit Ekonomi Kerakyatan (Studi Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)** Volume 1, Nomor 2, Juli 2021: 16-28 di tahun 2021.

Adapun prestasi yang pernah di raih sejak proses Pendidikan yaitu beasiswa BidikMisi S1 Tahun 2010 s/d 2014, STUDENT CAMP ke kampus Kolejc Islamic Tehnologi Antar Bangsa (KITAB) pulau pinang Malaysia 2013, Study Banding Mahasiswa BidikMisi Se-indonesia lingkup PTAIN di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, dalam pengalaman berorganisasi semasa mahasiswa pernah jadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (BEM FSEI) IAIN Mataram 2013 s/d 2014, di oraganisasai ekstra kampus pernah di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulma (IPNU), Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR), Barisan Ansor Serba Guna (BANSER), Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) Lombok Utara 2022 s/d 2026, kemudian ketua Kajian Pemuda Rakyat Bumi Gora Nusa Tenggara Barat 2016 samapai sekarang, mennjadi Anggota Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) NTB, Juga sebagai Wakil Sekertaris Lemba Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) NTB.

# BIOGRAFI PENULIS II

**Habibul Umam Taqiuddin, S.H, M.H** anak dari Drs. TGH. Ahmad Taqiuddin, M.Pd.I dan Ibu Dra. Hj. Hatiyatul Malichah lahir di Mataram, 23 Maret 1986 Pekerjaan Dosen yang dibesarkan di lingkungan pesantren, Email gushabib2017@gmail.com menempuh Pendidikan formal di SD Negeri 3 Tanjung Karang Ampenan 1993-1999, SLTP Negeri 1 Mataram 1999-2002, SMU Negeri 2 Mataram 2002-2005, menyelesaikan strata satu di Universitas Pancasila Jakarta focus keeilmuan ilmu hukum pada tahun 2005-2009 kemudian S-2 Ilmu Hukum Universitas Mataram 2010-2012 pernah berkecimpung di Organisasi Sekretaris Siswa SMU Negeri 2 Mataram Pencinta Alam Periode 2003-2004 Pendiri Komisariat Persiapan PMII Universitas Pancasila Jakarta 2007 Wakil Ketua PW. IPNU NTB Masa Khidmat 2012-2015, Koordinator Departemen Riset dan Kajian PW. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia LAKPESDAM) NU NTB Masa Khidmat 2012-2017, Sekretaris PW. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) NTB Masa Khidmat 2012-2017 Wakil Ketua PW GP. Ansor NTB Masa Khidmat 2015-2018, Wakil Bendahara DPD KNPI NTB Masa Bhakti 2012-2015, sebagai lowyer juga di Ikatan Advokat Indonesia.

Juga penulis karya ilmiah di jurnal Selong Nomor: 55/Pdt.G/2020/Pn.Sel), Jurnal Ilmiah Mandala Education (Sinta 4), Vo.: 7, No. 2 April 2021**,** Habibul Umam Taqiuddin, Risdiana, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (Sinta 5), Vol. 6, No. 1 Januari 2022**,** Yadi Imansyah, Habibul Umam Taqiuddin, Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan Karakter Di Pondok

Pesantren, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (Sinta 5), Vol. 6, No. 2 April 2022

# STRATEGI PESANTREN MENUJU EKONOMI KREATIF

Buku ini berjudul "Ekonomi Pembangunan (Strategi Pesantren Menuju Ekonomi Kreatif)'' kalau bicara mengenai ekonomi sangat luas pembahasannya, karena menjalankan kehidupan didunia yang fana ini harus dibekali dengan ilmu ekonomi Islam dan konfensional, apalagi menjalankan ekonomi rumah tangga, ekonomi pesantren, ekonomi masyarat, bahkan membangun ekonomi negara.

Persoalan ekonomi bisa membuat orang siap mengambil resiko baik dalam keadaan apapun, karena sudah merasa terdesak dan pemikiran sudah mulai rumit, sehingga banyak masyarakat terjurumus untuk berhutang, ada juga yang menjual asset pribadi dan menjual harta warisanya, bahkan ada yang sampai meninggalkan keluarga kecilnya untuk mencarikan nafkah demi kebutuhan untuk memenuhi papan, pangan dan sandang solusi menurut mereka adalah ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) "merantau''.

Buku ini pada awalnya adalah hasil penelitian penulis, materi perkuliahan yang penulis sampaikan di beberapa seminar ilmiaah dan berbagai forum diskusi, kemudian disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan gaya hidup masyarakat yang penuh dengan lika-liku tantangan zaman dan pengaruh ekonomi global, semoga dengan hadirnya buku ini sahabat pembaca mempunyai refrensi untuk menjalankan roda muamalah.


Jl. Pendidikan No. 6 Mataram
http://press.unu-ntb.ac.id/
ununtb.press@gmail.com